

Pendidikan sebagai Pilar Pembentukan Manusia: Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Ilmiah

**Nurul Arifah, Yuhanita Ulzana,
Devie Silfiyani Sahrida, Farah Maulida Amalia**



**Pendidikan sebagai Pilar
Pembentukan Manusia:
Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Ilmiah**

Pendidikan sebagai Pilar Pembentukan Manusia: Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Ilmiah

Nurul Arifah, Yuhanita Ulzana,
Devie Silfiyani Sahrida, Farah Maulida Amalia



Pendidikan sebagai Pilar Pembentukan Manusia: Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Ilmiah

Penulis:

Nurul Arifah, Yuhanita Ulzana,
Devie Silfiyani Sahrida, Farah Maulida Amalia

Editor:

Agus Tinus

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Juli 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 14,8 x 21 cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dengan judul *“Pendidikan sebagai Pilar Pembentukan Manusia: Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Ilmiah”* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam upaya memahami pendidikan tidak hanya sebagai proses formal di ruang kelas, tetapi juga sebagai pilar utama pembentukan kepribadian, karakter, dan kemanusiaan secara menyeluruh.

Dalam buku ini, pembaca akan diajak menelusuri konsep pendidikan dari berbagai sudut pandang, mulai dari definisi yang bersifat etimologis dan yuridis, hingga pendekatan ilmiah dan filosofis yang mendalam. Setiap bab dirancang untuk menggugah kesadaran akan pentingnya pendidikan yang bermakna dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Bab demi bab membahas mulai dari pengertian dan tujuan pendidikan, dasar dan ideologi yang melandasinya, tantangan dalam sistem pendidikan nasional, hingga fungsi lembaga pendidikan dan relevansinya dalam struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, buku ini tidak hanya cocok dibaca oleh para mahasiswa dan akademisi, tetapi juga oleh para praktisi pendidikan, pembuat kebijakan, serta siapa pun yang peduli terhadap kemajuan bangsa melalui pendidikan.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi dalam mengembangkan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
PENGERTIAN PENDIDIKAN	1
A. Pengertian Pendidikan menurut KBBI	4
B. Pengertian Pendidikan menurut Etimologi	6
C. Pengertian Pendidikan menurut S isdiknas No.20 Tahun 2003	8
D. Pengertian Pendidikan menurut Pendekatan Ilmiah	9
E. Pengertian Pendidikan menurut Tokoh Nasional	18
F. Pengetian Pendidikan menurut Tokoh Internasional	24
G. Daftar Pustaka	33
DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN	35
A. Definisi Pendidikan	37
B. Dasar Pendidikan	38
C. Landasan Teoritis pendidikan	39
D. Tujuan Pendidikan	45
E. Ideologi Pendidikan	47
F. Daftar Pustaka	57
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: TANTANGAN DAN ARAH PENGEMBANGAN	62
A. Struktur dan Regulasi Sistem Pendidikan Nasional	63
B. Tantangan dalam Sistem Pendidikan Nasional	66
C. Arah Pengembangan dan solusi	70
D. Daftar Pustaka	78
FUNGSI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN	84

A.	Dimensi Fungsional Pendidikan	87
B.	Tipologi Lembaga Pendidikan	94
C.	Peran Lembaga Pendidikan Dalam Struktur Sosial	98
D.	Tantangan Paradigmatik dalam Pendidikan	101
E.	Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan	101
F.	Dinamika Globalisasi dan Digitalisasi Dalam Kurikulum	102
G.	Ketidaksesuaian Antara Kompetensi Akademik dan Kebutuhan Industri	103
H.	Daftar Pustaka	105

PENGERTIAN PENDIDIKAN

Pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan tiga aspek utama, yaitu individu, masyarakat atau komunitas tempat individu tersebut berada, serta keseluruhan unsur realitas baik yang bersifat fisik maupun spiritual yang turut memengaruhi bentuk, karakter dan arah kehidupan manusia serta masyarakat. Pendidikan bukan sekadar aktivitas mengajar, melainkan mencakup proses penyampaian pengetahuan, internalisasi nilai-nilai, dan pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Sementara itu, pengajaran cenderung lebih fokus pada pengembangan keahlian atau spesialisasi dalam bidang tertentu, sehingga pendekatannya lebih bersifat teknis dan terarah pada minat khusus. Pendidikan merupakan proses esensial dalam mencapai keseimbangan dan kesempurnaan perkembangan individu dan masyarakat [1].

Dibandingkan dengan pengajaran, pendidikan lebih menitikberatkan pada pembentukan kesadaran dan kepribadian, selain fungsi dasarnya sebagai sarana transfer ilmu dan keterampilan. Melalui mekanisme ini, suatu bangsa atau negara mampu mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran, serta keterampilan kepada generasi penerus, sehingga mereka memiliki kesiapan yang optimal dalam menghadapi tantangan masa depan demi kemajuan bangsa dan negara. Selain itu, pendidikan adalah suatu aktivitas yang memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk mengembangkan secara maksimal potensi yang dimiliki oleh individu, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat [2].

Segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan manusia yang dimulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai pada perkembangan iman merupakan pekerjaan mendidik.. Pengertian sederhana dan umum dari makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dan budaya ada bersama untuk saling memajukan [3].

Dasar pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menekankan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana. Dasar-dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut : (1) Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950, Nomor 2 tahun 1945, Bab III Pasal 4 Yang Berbunyi: Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI dan kebudayaan bangsa Indonesia (2) Ketetapan MPRS No. XXVII/ MPRS/ 1966 Bab II Pasal 2 yaitu Dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. (3) GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983 dan GBHN 1988 Bab IV bagian pendidikan yaitu Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila. (4) Tap MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dalam Bab IV bagian Pendidikan yaitu Pendidikan Nasional (yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (5) Undang-undang RI No 2 Tahun 1989, mengenai Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (6) Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar hukum di atas menjelaskan dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai UUSPN No. 2 tahun 1989 dan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003) [4].

Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003) [4].

Perlu diketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering di pergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi dan pedagoik. Pedagogi berarti “pendidikan” sedangkan pedagoik artinya “ilmu pendidikan”. Pedagogos yang awalnya berarti pelayanan kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia. Karena pengertian pedagogi (dari *pedagogos*) berarti seorang dengan tugas membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke daerah berdiri sendiri dan bertanggung jawab [3].

Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai upaya penyampaian informasi dan pembentukan keterampilan semata, melainkan mencakup usaha yang lebih luas untuk mewujudkan keinginan, memenuhi kebutuhan, serta mengembangkan potensi individu secara optimal guna mencapai pola kehidupan pribadi dan sosial yang harmonis. Pendidikan tidak sekadar diposisikan sebagai persiapan menghadapi masa depan, melainkan juga sebagai proses yang relevan dengan kehidupan anak saat ini, yang tengah menjalani fase perkembangan menuju kedewasaan. Pada dasarnya, pendidikan merupakan proses pembelajaran yang memungkinkan setiap individu (peserta didik) untuk memahami, menghayati, serta tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan mampu berpikir secara kritis [3].

Terselenggaranya sistem Pendidikan nasional yang relevan dan bermutomerupakan factor penentu keberhasilan kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Karena itu para pendidri negara menetapkan Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia dan mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pengajaran nasional [2].

A. Pengertian Pendidikan menurut KBBI

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap, tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan [5]. Selain itu, kata pendidikan berasal dari kata dasar didik, yang kemudian mendapat imbuhan menjadi mendidik, yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dengan demikian, pendidikan mencakup

proses yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian individu agar menjadi manusia yang dewasa dan bertanggung jawab.

Dalam lingkungan sekolah, penerapan pendidikan terlihat dari peran guru yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan seperti matematika atau sains, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama. Misalnya, seorang guru mengajarkan siswa untuk datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan jujur, dan menghormati pendapat teman. Semua ini merupakan bentuk nyata dari proses pendidikan yang bertujuan membentuk perilaku siswa ke arah yang lebih dewasa dan bertanggung jawab.

Pada lingkungan keluarga, pendidikan terjadi secara informal namun sangat fundamental. Seorang anak yang dibimbing oleh orang tuanya untuk bersikap sopan, menghormati orang tua, dan menjaga kebersihan diri, sedang mengalami proses pendidikan sebagaimana yang dimaksud KBBI. Melalui bimbingan dan contoh langsung dari orang tua, anak perlahan-lahan membentuk pola sikap dan perilaku yang positif, yang menjadi bekal dalam kehidupan sosialnya.

Dalam dunia kerja, pendidikan diterapkan melalui berbagai bentuk pelatihan dan pembinaan karakter. karyawan baru, misalnya, dilatih untuk memahami budaya kerja, pentingnya etika profesional, serta kemampuan berkomunikasi dengan baik. Pelatihan-pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga mengubah cara berpikir dan sikap kerja agar lebih produktif dan profesional.

Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan terjadi melalui kegiatan seperti penyuluhan kesehatan, kampanye lingkungan hidup, atau pelatihan kewirausahaan.

Warga yang mengikuti kegiatan tersebut diarahkan untuk mengubah pola pikir dan perilaku mereka agar lebih peduli terhadap kesehatan, lingkungan, dan kemandirian ekonomi.

Dengan demikian, penerapan pendidikan menurut KBBI menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses panjang yang berlangsung seumur hidup, yang secara bertahap membentuk manusia menjadi pribadi yang dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

B. Pengertian Pendidikan menurut Etimologi

Dalam Bahasa Indonesia kata pendidikan berasal dari kata dasar “didik”. Kata ini kemudian mendapat awalan “pe-” dan akhiran “-an”, sehingga menjadi “pendidikan”, yang berarti proses atau perbuatan untuk mendidik. Pendidikan tidak harus didapatkan di lingkungan sekolah tapi juga bisa didapatkan dengan melakukan hal-hal terkecil yang sering kita lakukan dan jumpai dalam kehidupan. Pendidikan terbaik berasal dari pengalaman pribadi kita sendiri [2].

Kata "pendidikan" berasal dari bahasa Latin *educare*, berarti "membimbing keluar" atau "mengembangkan" [2]. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses mentransfer pengetahuan semata, melainkan sebagai usaha sistematis untuk menumbuhkan seluruh potensi dalam diri manusia—baik akal, jiwa, moral, maupun keterampilannya—agar berkembang secara menyeluruh dan seimbang.

Implementasi dari makna etimologis ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di lingkungan sekolah, misalnya, pendidikan tidak hanya terwujud dalam bentuk penyampaian materi pelajaran, tetapi juga dalam bimbingan dan pembinaan karakter siswa. Seorang guru yang mengajak siswanya berdiskusi terbuka,

mengarahkan mereka untuk berpikir kritis, serta memberi ruang untuk berekspresi secara mandiri, sejatinya sedang menjalankan fungsi pendidikan sebagaimana dimaknai secara etimologis. Ia membantu siswa "keluar" dari kebingungan menuju pemahaman, dan dari ketergantungan menuju kemandirian.

Di rumah, orang tua yang membimbing anak-anaknya bukan hanya soal aturan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, kasih sayang, kerja keras, dan kepercayaan diri, turut mengimplementasikan pendidikan sebagai proses "menumbuhkan" jiwa manusia secara utuh. Anak tidak hanya diajari tentang benar dan salah, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengalami, memahami, dan belajar dari kehidupan.

Begitu pula dalam masyarakat, pendidikan tampak dalam kegiatan seperti pelatihan keterampilan, forum diskusi warga, hingga pendampingan kelompok rentan. Ketika seorang tokoh masyarakat atau fasilitator lokal mendorong masyarakat untuk mengenali potensi lingkungannya, mencari solusi terhadap persoalan sosial, serta mengelola sumber daya secara mandiri dan adil, maka ia sedang mewujudkan pendidikan dalam arti "membesarkan" kapasitas kolektif masyarakat untuk berpikir dan bertindak.

Dengan demikian, implementasi pendidikan berdasarkan pengertian etimologis bukan hanya soal pemberian materi ajar, melainkan soal menumbuhkan kesadaran, membimbing potensi, dan mengarahkan perkembangan individu dan masyarakat ke arah yang lebih matang, mandiri, dan bermakna. Pendidikan sejati adalah proses memanusiakan manusia.

C. Pengertian Pendidikan menurut Sisdiknas No.20 Tahun 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara [3]. Pendidikan ditemukan dalam berbagai bentuk penyelenggaraan pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal. Di sekolah, sebagai jalur pendidikan formal, guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran tetapi juga menciptakan suasana yang mendukung proses pembelajaran aktif. Misalnya, melalui metode diskusi, praktik langsung, proyek kolaboratif, atau kegiatan ekstrakurikuler yang memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, berkreasi, dan menumbuhkan rasa percaya diri.

Dalam konteks ini, pendidikan bukan sekadar transmisi ilmu, tetapi sebuah proses yang dirancang dengan sadar untuk membentuk karakter dan mengasah potensi setiap individu.

Di luar sekolah, dalam jalur pendidikan nonformal seperti kursus, pelatihan keterampilan, atau kegiatan keagamaan, pendekatan yang digunakan pun mencerminkan prinsip pendidikan menurut Sisdiknas. Sebagai contoh, pelatihan kewirausahaan yang tidak hanya memberi peserta keahlian teknis, tetapi juga membina etika kerja, membangun mental wirausaha, dan memperkuat kemandirian ekonomi, menunjukkan bahwa pendidikan diarahkan untuk membangun manusia secara utuh.

Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, yang merupakan jalur pendidikan informal, peran orang tua dan masyarakat juga mencerminkan semangat Undang-Undang ini. Ketika orang tua membiasakan anak untuk bertanggung jawab, beribadah, sopan santun, dan saling menghormati, mereka secara sadar membentuk kepribadian dan nilai moral anak sebagai bagian dari pendidikan seumur hidup.

Dengan demikian, implementasi pendidikan menurut UU Sisdiknas bukan hanya terlihat dari kegiatan belajar di dalam kelas, tetapi juga dari bagaimana setiap unsur dalam masyarakat secara sadar dan terencana terlibat dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya—yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak, terampil, dan siap menjadi bagian dari kemajuan bangsa dan negara.

D. Pengertian Pendidikan menurut Pendekatan Ilmiah

Berdasarkan pandangan psikologi.. Berdasarkan analisis psikologis, pendidikan dapat dilihat sebagai sarana untuk pertumbuhan setiap seseorang. Proses pembelajaran memainkan fungsi penting dalam pendampingan hidup setiap individu, mulai dari lahir hingga kembali ke dunia, dan perjalanan pendidikan tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa ada kemajuan dalam psikologi perkembangan sifat serta karakter setiap individu.

Pendidikan menurut psikologi tidak hanya menekankan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses perkembangan mental dan kepribadian peserta didik secara bertahap sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan manusia.

Implementasi dari pandangan ini dapat dilihat dalam bagaimana sistem pendidikan dan pembelajaran dirancang dengan memperhatikan tahapan perkembangan psikologis anak. Misalnya, di jenjang pendidikan dasar, guru tidak hanya memberikan materi akademik, tetapi juga menggunakan

pendekatan yang sesuai dengan dunia anak dengan permainan, cerita, atau simulasi—untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan membangun fondasi kepribadian yang sehat.

Di sisi lain, dalam dunia pendidikan remaja, pendekatan psikologis lebih menekankan pada pembentukan identitas diri, pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan pengelolaan emosi. Guru berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing yang mendukung siswa dalam menghadapi tekanan sosial, menemukan jati diri, dan belajar mengambil keputusan secara mandiri.

Dalam praktik bimbingan dan konseling di sekolah, implementasi pendidikan dari sisi psikologi tampak jelas. Konselor sekolah membantu peserta didik memahami potensi, mengatasi hambatan belajar, serta mengembangkan motivasi dan rasa percaya diri. Dengan bantuan psikologis ini, siswa dapat mengatasi masalah pribadi atau sosial yang dapat menghambat proses pendidikan formalnya.

Lebih luas lagi, dalam konteks masyarakat, pendidikan berbasis psikologi diterapkan melalui program-program pengembangan karakter, parenting education, hingga pelatihan sosial-emosional bagi anak dan orang tua. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran emosional, empati, pengendalian diri, dan keterampilan sosial yang sangat penting dalam membentuk manusia yang utuh.

Dengan demikian, pendidikan dari sudut pandang psikologi tidak hanya berfokus pada “apa yang dipelajari”, tetapi juga “bagaimana seseorang belajar dan berkembang secara psikologis”. Tujuan akhirnya adalah membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, sehat secara mental, dan

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara positif.

Berdasarkan pandangan politik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945, diamanatkan "Negara harus mengalokasikan setidaknya 20% dari anggaran untuk pendidikan (ayat 4), serta pemerintah diwajibkan mendorong perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menghargai nilai agama serta persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia (ayat 5).

Selanjutnya, ketetapan dalam Undang-Undang Dasar itu diimplementasikan melalui perundang-undangan Nomor 20 tahun 2003 mengenai "Sistem Pendidikan Nasional" sebagai hasil dari konsensus politik. Terdapat sedikitnya lima pengaruh politik terhadap pendidikan, yaitu: "(a) Politik memiliki dampak pada proses pendidikan dalam membentuk nilai dan harapan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan negara, (b) Politik memengaruhi alokasi dana untuk sektor pendidikan, (c) Politik berdampak pada sumber daya pendidikan seperti gaji tenaga pengajar, fasilitas pendukung kegiatan belajar, dan pelatihan bagi guru, (d) Politik memberikan pengaruh pada struktur sistem sekolah, system penghargaan bagi guru, serta proses penerimaan siswa, (e) Politik memengaruhi kualitas lulusan yang dapat dilihat dari perilaku politik, budaya, ekonomi, dan sosial para lulusannya. Setelah penerapan pendidikan yang mandiri, tanggung jawab terhadap pelaksanaan otonomi daerah berarti bahwa pengelolaan pendidikan tidak lagi ditentukan secara sentral dari pusat.

Saat ini, kemampuan pemerintahan daerah yang otonom dalam memajukan pendidikan sangat terbuka, meskipun setiap daerah menghadapi tantangan baik dari segi

kurangnya tenaga pengajar maupun terbatasnya anggaran untuk pendidikan.

Berdasarkan pandangan sosiologi. Menurut sosiologi, peran pengajar dalam bidang sosiologi adalah seperti seorang perawat atau pengasuh kehidupan serta membantu dalam memperbaiki kualitas Masyarakat [6]. Pendidikan berfungsi sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kualitas masyarakat, seperti ideologi, budaya dan ekonomi. Dengan demikian, pendidikan menjadi sebuah kekuatan sosial yang juga dapat digunakan untuk melakukan analisis dan penghargaan terhadap maksud penerimaan sesuatu di dalam komunitas. Dimana dikatakan bahwa darma Pendidikan Nasional adalah “mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap”.

Dengan kata lain, semua aktivitas sosial individu selama masa belajar adalah suatu cara untuk bertransformasi, sehingga pendidikan dapat berfungsi sebagai alat bagi setiap orang untuk membangun relasi yang tepat, baik, dan benar dalam sebuah komunitas atau dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Dari perspektif sosiologi, pendidikan dipandang sebagai lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan keteraturan masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk mentransmisikan nilai-nilai, norma, budaya, dan peran sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pandangan ini, pendidikan adalah kunci dalam pembentukan

identitas sosial, penguatan solidaritas, serta penjaga kestabilan dan mobilitas sosial.

Implementasi pendidikan dalam pandangan sosiologis sangat terlihat dalam struktur sistem pendidikan formal di sekolah. Sekolah bukan hanya tempat siswa memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga tempat di mana mereka belajar berinteraksi dengan teman sebaya, menghormati aturan, mematuhi otoritas (guru), dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial. Dalam konteks ini, sekolah menjadi wadah untuk sosialisasi sekunder, di mana individu mulai memahami peran-peran sosial yang lebih kompleks di luar keluarga.

Misalnya, di dalam kelas, siswa tidak hanya belajar matematika atau bahasa, tetapi mereka juga belajar tentang kerja sama, kompetisi yang sehat, kedisiplinan, serta bagaimana menyelesaikan konflik sosial. Hal ini membantu membentuk kepribadian yang sesuai dengan tuntutan masyarakat serta memperkuat integrasi sosial. Pendidikan secara sosiologis membantu individu memahami posisi sosialnya, baik sebagai pelajar, anggota keluarga, maupun calon pekerja dan warga negara.

Lebih jauh lagi, dalam masyarakat modern, pendidikan memainkan peran sebagai alat mobilitas sosial vertikal, yaitu memungkinkan seseorang berpindah dari status sosial yang lebih rendah ke status sosial yang lebih tinggi melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan. Seorang anak dari keluarga sederhana, misalnya, bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan posisi sosial yang lebih tinggi setelah menempuh pendidikan tinggi. Inilah yang disebut fungsi meritokrasi pendidikan dalam sosiologi.

Namun demikian, sosiologi juga melihat pendidikan sebagai cermin ketimpangan sosial. Dalam masyarakat yang

belum merata secara ekonomi, pendidikan sering kali mencerminkan dan bahkan memperkuat kesenjangan sosial. Anak-anak dari keluarga kaya cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan bermutu, sedangkan mereka yang berasal dari kelompok kurang mampu menghadapi hambatan struktural seperti minimnya fasilitas, biaya tinggi, atau keterbatasan literasi orang tua. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan juga dapat mereproduksi ketidaksetaraan sosial.

Implementasi pendidikan dari kacamata sosiologi juga mencakup peran pendidikan dalam mengintegrasikan keberagaman budaya, etnis, dan agama. Melalui kurikulum dan aktivitas sosial di sekolah, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan, memperkuat toleransi, dan menjalin solidaritas sosial, yang sangat penting dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Dengan demikian, dari pandangan sosiologis, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan individu, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk hidup bersama secara harmonis dalam masyarakat. Pendidikan adalah alat untuk menciptakan kohesi sosial, membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan pandangan ekonomi. Pendidikan adalah investasi dalam bentuk sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih. Ia merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga melalui pendidikan, aspek psikomotorik dan kognitif individu mampu berkembang, yang pada gilirannya dapat memunculkan ide-ide baru dan berpotensi meningkatkan pendapatan perorangan serta pendapatan negara [6]. Dengan adanya pendidikan, kualitas dan kompetensi tenaga kerja

dapat ditingkatkan bahkan di sektor lain pula. Kesejahteraan para pendidik juga sangat terkait dengan perkembangan ekonomi yang mereka nikmati.

Pandangan alam perspektif ilmu ekonomi, pendidikan dipandang sebagai investasi sumber daya manusia yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan suatu negara. Pendidikan bukan hanya sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga merupakan sarana untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan efisiensi kerja, serta memperluas kesempatan kerja dan pendapatan individu. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk tenaga kerja yang kompeten, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan pasar.

Implementasi dari pandangan ini dapat dilihat dari bagaimana negara-negara membangun sistem pendidikan sebagai bagian integral dari perencanaan ekonomi jangka panjang. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebagai bentuk investasi publik untuk mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan pembangunan. Pendidikan dasar dan menengah menjamin literasi dasar dan pembentukan karakter kerja, sementara pendidikan tinggi dan vokasional diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

Contohnya, pelatihan kejuruan (*vocational training*) yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau industri dirancang untuk menyiapkan peserta didik masuk langsung ke dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, baik secara individu maupun nasional. Seseorang dengan pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi cenderung

memiliki penghasilan yang lebih baik dan daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja.

Lebih dari itu, pendidikan juga memainkan peran penting dalam mengurangi pengangguran dan memutus rantai kemiskinan. Individu yang berpendidikan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, berwirausaha, atau menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi alat mobilitas ekonomi, memungkinkan seseorang berpindah dari lapisan ekonomi bawah ke lapisan yang lebih sejahtera.

Dalam sektor industri dan perusahaan, pendidikan berperan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan, magang, dan sertifikasi. Perusahaan yang terus meningkatkan kualitas SDM-nya akan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar global. Inilah yang disebut pendidikan sebagai modal manusia (*human capital*)—faktor penting dalam produktivitas dan pertumbuhan perusahaan.

Di sisi lain, pendekatan ekonomi terhadap pendidikan juga menekankan pada efisiensi dan efektivitas. Ini berarti bahwa pendidikan harus dirancang dengan memperhatikan biaya dan manfaat. Program pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja agar tidak terjadi mismatch antara lulusan dan lapangan kerja yang tersedia. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu melakukan riset pasar kerja secara berkala agar pendidikan benar-benar menjadi penopang pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, dari sudut pandang ilmu ekonomi, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai hak dasar manusia, tetapi juga sebagai kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi

ketimpangan sosial, dan meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi.

Berdasarkan pandangan antropologi Pendidikan merupakan suatu proses manusia sebagai makhluk yang berbudaya, untuk itu antropologi merumuskan “bahwa sekolah merupakan sebuah benda budaya yang menjadi skema nilai-nilai dengan membimbing masyarakat” [6].

Dengan berbagai cara pengajaran yang tidak efektif dibandingkan dengan media pendidikan, hal ini sangat bertentangan dengan analisis sumber yang diperoleh di lapangan oleh para ahli antropologi. Oleh karena itu, peran pendidik tidak hanya terbatas pada penekanan nilai budaya, tetapi juga mencakup pengaturan dan konfrontasi antara gagasan dan tindakan dalam bidang pendidikan.

Implementasi pendidikan dari perspektif antropologi terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun modern. Dalam masyarakat adat, misalnya, pendidikan berlangsung secara informal melalui cerita rakyat, ritual, upacara adat, dan pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak belajar cara berburu, bertani, menenun, atau memimpin upacara bukan di sekolah, tetapi melalui pendampingan langsung dari orang tua dan tokoh adat. Pendidikan di sini bersifat kontekstual dan menyatu dengan kehidupan budaya masyarakat.

Dalam masyarakat modern, implementasi pendidikan secara antropologis tampak melalui pengintegrasian muatan lokal dan kearifan budaya dalam kurikulum sekolah. Sebagai contoh, pelajaran tentang budaya daerah, bahasa lokal, seni tradisional, dan sejarah lokal merupakan bentuk upaya pelestarian identitas budaya melalui jalur pendidikan formal. Ini penting agar generasi muda tidak tercerabut dari akar

budayanya, meskipun hidup di era globalisasi yang penuh dengan pengaruh budaya luar.

Pendidikan dari kacamata antropologi juga menekankan pada pentingnya pengakuan terhadap keragaman budaya. Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, sistem pendidikan harus bersifat inklusif dan menghargai pluralitas. Implementasinya dapat berupa pengajaran toleransi, kerja sama lintas budaya, serta pembelajaran multikultural yang membentuk sikap saling menghormati antar kelompok etnis, agama, dan bahasa.

Lebih lanjut, pendidikan dalam konteks antropologi juga berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Ketika suatu masyarakat mengalami modernisasi, pendidikan menjadi jalur utama untuk mengenalkan nilai-nilai baru yang dibutuhkan, seperti kesetaraan gender, demokrasi, dan pelestarian lingkungan. Namun, proses perubahan ini tetap harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal agar tidak menimbulkan konflik sosial atau kehilangan identitas budaya. Dengan demikian, dari perspektif antropologi, pendidikan tidak sekadar bertujuan mencerdaskan individu, tetapi juga membentuk manusia yang berbudaya, berakar pada nilai-nilai leluhur, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Pendidikan adalah proses kemanusiaan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan sebuah peradaban.

E. Pengertian Pendidikan menurut Tokoh Nasional

Ki Hajar Dewantara, Definisi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses penunjang kekuatan kodrat sebagai manusia yang memiliki akal, dalam menguasai pengetahuan pada peserta didik dengan tujuan manusia dapat meninggikan derajatnya melalui pendidikan yang setinggi-tingginya [7]. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan

sebagai usaha untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik lahir maupun batin. Pandangan ini menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar alat untuk mencerdaskan otak, tetapi lebih dari itu, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia secara utuh—baik secara intelektual, emosional, sosial, spiritual, maupun moral.

Implementasi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara terlihat dari sistem dan filosofi pendidikan yang ia rintis, yaitu Taman Siswa, yang ia dirikan pada tahun 1922. Di lembaga ini, pendidikan tidak dijalankan secara kaku dan otoriter, tetapi penuh kasih sayang, kebebasan, dan penghargaan terhadap kodrat anak. Filosofi pendidikannya terangkum dalam semboyan terkenal:

“Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.”. Yang berarti: "Di depan memberi teladan," menunjukkan bahwa guru atau pendidik harus menjadi contoh nyata dalam tingkah laku dan sikap. "Di tengah membangun semangat," menggambarkan bahwa guru harus menjadi motivator dan fasilitator bagi peserta didik. "Di belakang memberi dorongan," menunjukkan peran guru yang mendorong dan memberi kepercayaan kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya.

Bentuk Implementasi Pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti pembelajaran yang berpusat pada anak, pendidikan harus memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan anak. Anak tidak boleh dipaksa untuk belajar sesuatu yang tidak sesuai dengan perkembangannya. Pendidik bertugas menuntun, bukan memaksa, penghargaan terhadap budaya dan nilai kebangsaan serta pendidikan yang dirintis Ki Hajar

Dewantara tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas, tetapi juga yang berkepribadian nasional. Oleh karena itu, muatan lokal, bahasa daerah, seni, dan kebudayaan menjadi bagian penting dalam proses belajar.

Pembentukan karakter dan moral. Pendidikan menurut Ki Hajar tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir, tetapi juga budi pekerti, etika, dan rasa tanggung jawab sosial. Ini menjadi cerminan pendidikan yang berjiwa humanis dan integral. Pendidikan karakter merupakan upaya terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik menjadi insani kamil [8].

Kebebasan dalam belajar, dalam sistem Taman Siswa, anak-anak diberikan kebebasan berekspresi dan berpikir, karena menurut Ki Hajar, pendidikan yang baik adalah yang membebaskan, bukan mengekang kreativitas dan daya nalar.

Peran aktif keluarga dan Masyarakat. Ki Hajar menekankan bahwa pendidikan tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sosial. Oleh sebab itu, pembentukan watak dan kepribadian anak harus didukung oleh lingkungan yang sehat secara sosial dan budaya.

Pendidikan sebagai jalan untuk Merdeka. Merdeka dalam arti bebas berpikir, bebas belajar, dan bebas tumbuh sebagai manusia yang utuh. Pendidikan tidak boleh dijadikan alat penindasan, tetapi alat pembebasan dan pemberdayaan.

Hingga kini, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dan menjadi landasan Kurikulum Merdeka yang sedang diterapkan di Indonesia, di mana pembelajaran berbasis minat, proyek, dan kebudayaan lokal menjadi inti dalam proses pendidikan.

Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus berakar pada konteks budaya dan sosial siswa, menekankan pentingnya pengembangan karakter bersama prestasi akademik. Pendidikan yang holistik ini bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki budi pekerti dan mampu berkontribusi positif terhadap masyarakat. Pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara juga menekankan peran aktif siswa dalam proses belajar, di mana mereka diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi diri secara maksimal. Pendidikan yang demikian tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan nilai-nilai moral yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang berlandaskan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang mandiri, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana.

KH. Ahmad Dahlan. Menurut perspektif Ahmad Dahlan pendidikan tidak hanya sebuah alat yang digunakan untuk mentransfer suatu ilmu pengetahuan, melainkan dapat digunakan sebagai sarana dalam pembentukan karakter pada setiap individu [9]. Metode kontemporer yang ada pada tahun 1912 menampilkan kurikulum yang terarah, sistem tradisional, papan tulis, serta alat belajar.

Pembaruan dalam bidang pendidikan Islam yang dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan lebih menyoroti pendekatan modern dalam pendidikan, mengadopsi model dari Belanda dengan menggabungkan metode pendidikan Belanda dan sistem pesantren. K.H. Ahmad Dahlan dikritik sebagai seseorang yang meremehkan agama karena meniru cara – cara pendidikan dari Belanda pada saat itu.

Sistem pendidikan yang digagas oleh KH Ahmad Dahlan adalah mengintegrasikan iman dengan kemajuan, menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemikiran pendidikan KH Ahmad Dahlan menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam proses belajar mengajar. Ia meyakini bahwa tujuan pendidikan sejati adalah membentuk karakter yang tangguh serta moral yang baik. Menurut pandangannya, lembaga pendidikan formal tidak hanya memiliki tugas untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik siswa agar menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. KH Ahmad Dahlan berpendapat bahwa pendidikan merupakan kolaborasi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial. Orang tua, masyarakat, serta pemimpin agama diharapkan berperan aktif dalam mendukung perkembangan pendidikan anak-anak. Maka dari itu, interaksi antara murid, orang tua, dan guru dianggap sebagai elemen kunci dalam pendidikan dan harus menjadi fokus utama.

KH Ahmad Dahlan memandang pendidikan sebagai jalan utama untuk mencerdaskan kehidupan umat dan membangkitkan kesadaran keislaman serta kebangsaan. Bagi Ahmad Dahlan, pendidikan adalah proses untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak mulia, mandiri, dan berdaya guna bagi masyarakat. Ia meyakini bahwa pendidikan yang baik harus mampu menggabungkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan modern, dan semangat pembaruan sosial.

Prinsip Dasar Pendidikan Menurut KH Ahmad Dahlan. Dalam merintis gerakan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan menekankan bahwa pendidikan harus bersumber

pada ajaran Islam yang murni (Al-Qur'an dan Sunnah), memberikan ilmu pengetahuan dunia secara menyeluruh, agar umat Islam tidak tertinggal dalam kemajuan zaman, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial dan ilmu pengetahuan.

Implementasi Pandangan Pendidikan Ahmad Dahlan yaitu I (a) integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ahmad Dahlan menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Sekolah Muhammadiyah yang ia dirikan mengajarkan ilmu agama secara mendalam, tetapi juga mengajarkan matematika, fisika, biologi, dan bahasa asing. Ini merupakan terobosan besar pada masa itu, di mana pendidikan Islam masih cenderung terpisah dari sains modern. (b) Pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif. Pendidikan menurut Ahmad Dahlan tidak hanya berhenti pada teori. Ia menekankan pentingnya mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, siswa diajarkan untuk peduli pada kondisi sosial masyarakat, seperti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. (3) Pemberdayaan kaum miskin dan marginal. Ahmad Dahlan mengutamakan pendidikan yang inklusif, terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang sosial. Ia mendirikan sekolah dan lembaga sosial untuk anak yatim, kaum miskin, dan perempuan—yang pada zamannya seringkali terpinggirkan dari dunia pendidikan. (4) Pendidikan perempuan sebagai bentuk emansipasi. Di tengah budaya patriarki, Ahmad Dahlan mendorong pendidikan bagi perempuan. Ia mendirikan 'Aisyiyah, organisasi perempuan Muhammadiyah, yang fokus pada pemberdayaan dan pendidikan kaum perempuan. Ini merupakan bentuk implementasi pendidikan yang berkeadilan gender dan

progresif. (5) Pembentukan karakter dan akhlak mulia. Bagi Ahmad Dahlan, pendidikan bukan hanya soal cerdas secara intelektual, tapi juga cakap secara moral. Pendidikan harus menghasilkan insan yang jujur, bertanggung jawab, toleran, dan memiliki semangat melayani sesama. (6) Pendidikan untuk perubahan social. Pandangan Ahmad Dahlan menempatkan pendidikan sebagai alat perubahan dan pembaruan umat. Ia mengajak umat Islam untuk bangkit dari keterbelakangan, tidak hanya dengan dakwah lisan, tetapi juga melalui lembaga pendidikan yang mencetak generasi pembaharu.

Peninggalan dan pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan masih sangat terasa hingga saat ini, terutama melalui ribuan sekolah, madrasah, universitas, dan amal usaha Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pendidikan dalam pandangan Ahmad Dahlan adalah gerakan pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan, yang mengakar pada nilai Islam dan berpijak pada kebutuhan zaman.

F. Pengetian Pendidikan menurut Tokoh Internasional

John Dewey. Menurut John Dewey menjelaskan bahwa pengalaman merupakan asas atau dasar dari pendidikan. Selain itu juga, pengalaman menjadi sarana dan tujuan dari pendidikan. Hakekatnya pendidikan adalah suatu proses mencari atau menemukan dan mengolah secara terus-menerus. John Dewey juga mengungkapkan bahwa pendidikan harus mampu membuat peserta didik menjadi subjek untuk menafsirkan dan memaknai rangkaian pengalamannya sedemikian rupa agar dapat terus tumbuh dan kaya akan pengalaman tersebut [10].

Implementasi Pandangan John Dewey dalam Dunia Pendidikan (a) Pembelajaran berbasis pengalaman

(*experiential learning*). Di kelas yang mengadopsi pendekatan Dewey, peserta didik tidak hanya duduk dan mendengar, tetapi juga berpartisipasi aktif melalui kegiatan seperti eksperimen, proyek, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah nyata. Misalnya, dalam pembelajaran IPA, siswa diajak melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena alam alih-alih hanya membaca buku teks. (b) Kurikulum kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Implementasi gagasan Dewey tercermin dalam kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan, minat, dan konteks sosial peserta didik. Pembelajaran tidak disusun secara kaku, tetapi fleksibel dan berorientasi pada kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah agar siswa mampu menafsirkan pengalaman pribadi mereka dan menghubungkannya dengan konsep-konsep akademik. (c) Peserta didik sebagai subjek aktif dalam belajar. Dalam pendidikan menurut Dewey, siswa bukanlah objek pasif yang menerima informasi, melainkan subjek yang berpikir, menganalisis, dan menciptakan makna dari pengalaman mereka sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan potensi mereka melalui dialog, pertanyaan terbuka, dan pembelajaran kolaboratif. (d) Pendidikan sebagai proses pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Karena pengalaman melibatkan interaksi dengan lingkungan sosial dan moral, maka pendidikan juga bertujuan membentuk karakter, nilai, dan kemampuan berpikir kritis. Setiap pengalaman belajar dipandang sebagai kesempatan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, empati, dan kesadaran sosial. (e) Belajar sebagai proses berkelanjutan (*continuous reconstruction of experience*). Dewey menekankan bahwa belajar adalah proses refleksi atas pengalaman masa lalu untuk menyiapkan diri menghadapi pengalaman masa depan.

Ini berarti bahwa pendidikan harus mendorong siswa untuk merenung, mengevaluasi, dan memaknai apa yang mereka alami, agar pembelajaran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga transformatif.

Dengan demikian, implementasi pandangan John Dewey dalam pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang hidup, bermakna, dan berpusat pada pengalaman nyata peserta didik. Model ini menumbuhkan siswa yang kritis, mandiri, reflektif, dan terus berkembang seiring perjalanan hidupnya. Dalam era pendidikan modern, semangat Dewey terus hidup melalui pendekatan seperti *Project-Based Learning*, *Inquiry-Based Learning*, dan pendidikan kontekstual, yang menjadikan pengalaman sebagai jembatan utama menuju pemahaman dan pertumbuhan pribadi.

Herman. H. Horne. Pendidikan adalah proses yang secara terus menerus terjadi dari bentuk penyesuaian manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental agar meningkat lebih tinggi. Manusia tersebut juga memiliki kebebasan dan kesadaran yang termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan rasa kemanusiaan [11].

Implementasi Pendidikan sebagai Proses Penyesuaian
(a) Pendidikan sebagai Pembentukan Adaptasi Sosial dan Budaya. Di dalam masyarakat yang terus berubah, pendidikan menjadi media utama agar manusia dapat menyesuaikan diri terhadap nilai, norma, dan perubahan sosial yang dinamis. Misalnya, seorang anak yang tumbuh di era digital perlu dikenalkan tidak hanya pada teknologi, tetapi juga etika dalam berinteraksi di ruang digital. Pendidikan mengajarkan bagaimana bersikap dalam lingkungan sosial yang majemuk, penuh perbedaan, dan membutuhkan toleransi. (b) Pengembangan Kecerdasan Emosional dan Kesadaran Diri. Pendidikan juga mengasah

kepekaan emosional dan moral, yang merupakan bagian dari penyesuaian batin manusia dengan lingkungannya. Dalam proses belajar, anak-anak belajar mengenali emosi, berempati, dan berinteraksi dengan sehat. Hal ini terlihat dalam kurikulum pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama. (c) Pembebasan Pikiran dan Pengembangan Intelektual. Manusia memiliki potensi intelektual yang unik. Melalui pendidikan, potensi tersebut diarahkan agar berkembang menuju pemikiran kritis dan kreatif. Proses belajar tidak lagi semata hafalan, tetapi lebih menekankan pada pemahaman, eksplorasi, dan sintesis pengetahuan. Inilah bentuk nyata dari kebebasan berpikir yang menjadi ciri manusia yang berkembang secara mental. (d) Penanaman Rasa Kemanusiaan dan Kepedulian Lingkungan.

Pendidikan juga harus mampu menumbuhkan kesadaran ekologis dan kemanusiaan. Melalui pembelajaran yang berorientasi pada nilai dan aksi, peserta didik diajak untuk memahami kondisi sosial, peduli terhadap penderitaan sesama, dan berkontribusi dalam menjaga alam. Penanaman nilai-nilai ini merupakan wujud dari manifestasi kesadaran manusia dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan alam dan masyarakat.

Pembelajaran Sepanjang Hayat (*Lifelong Learning*). Karena pendidikan adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup, implementasinya tidak berhenti di sekolah. Manusia terus mengalami perubahan dan tantangan, sehingga pendidikan harus memberi kemampuan untuk terus belajar, menyesuaikan diri, dan bertumbuh dalam berbagai fase kehidupan—baik sebagai individu, anggota keluarga, warga negara, maupun bagian dari komunitas global.

Pendidikan yang sejati adalah proses yang tidak hanya meningkatkan kapasitas intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang sadar, bebas, dan mampu menjalani hidup dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan adalah sarana untuk mengaktualisasikan potensi tertinggi dalam diri manusia, agar dapat berperan aktif dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan orang lain.

J.J. Rosseau. Jean – Jacques Rousseau adalah seorang filsuf terkenal dari abad ke-18, yang melalui karyanya memperkenalkan gagasan pendidikan yang berbasis alam, yang menekankan perkembangan alami setiap individu sebagai dasar utama dalam proses belajar. Pemikiran Rousseau menyoroti nilai dari pengalaman langsung serta hubungan alami dengan lingkungan sebagai metode utama dalam mempengaruhi pembentukan karakter anak [2].

Implementasi Pandangan Rousseau dalam Praktik Pendidikan yaitu (a) Pendidikan yang berfokus pada anak (*child-centered education*). Dalam pendekatan Rousseau, anak menjadi pusat dari proses pembelajaran. Pendidikan tidak bersifat top-down atau instruktif, tetapi memberi ruang bagi anak untuk mengeksplorasi dunianya sendiri, belajar dari pengalaman dan kesalahan, serta menemukan makna secara mandiri. Guru berperan sebagai penuntun, bukan pengontrol. (b) Pembelajaran berbasis alam dan pengalaman konkret. Rousseau sangat menekankan hubungan antara anak dan alam. Anak didorong untuk berinteraksi dengan dunia nyata, bukan hanya duduk di kelas membaca buku. Misalnya, untuk memahami konsep tumbuhan, anak diajak berkebun; untuk belajar tentang kerja keras, anak diberi pengalaman langsung mengerjakan tugas praktis. Ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan membentuk

karakter. (c) Tahapan perkembangan anak sebagai dasar pembelajaran. Rousseau membagi perkembangan anak ke dalam beberapa fase dan menekankan bahwa setiap fase harus dihargai dan tidak boleh dipercepat. Misalnya, pada usia dini, anak lebih banyak belajar melalui indera dan pengalaman langsung, bukan dari logika atau hafalan. Pendidikan yang baik adalah yang tidak terburu-buru, melainkan selaras dengan kematangan emosional dan intelektual anak. (d) Pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter, bukan hanya intelektual. Rousseau percaya bahwa pendidikan yang sejati adalah yang membentuk manusia yang baik, bukan hanya pintar. Oleh karena itu, pengalaman hidup, hubungan dengan alam, dan latihan tanggung jawab adalah bagian penting dari pendidikan, karena semua itu membentuk nilai-nilai moral dan kebijaksanaan dalam diri anak. (e) Kebebasan dan otonomi anak dalam belajar. Implementasi pemikiran Rousseau juga menekankan pentingnya kebebasan anak dalam memilih, berekspresi, dan mengeksplorasi. Anak tidak harus terus-menerus diarahkan, melainkan diberi kesempatan untuk membuat pilihan sendiri, belajar dari konsekuensinya, dan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri.

Implementasi pendidikan ala Jean-Jacques Rousseau melahirkan pendekatan yang humanis, naturalistik, dan progresif, di mana setiap anak dihormati sebagai individu yang unik dengan potensi alami yang harus dikembangkan secara bertahap. Gagasan Rousseau masih sangat relevan hingga kini, terutama dalam pendekatan Montessori, pendidikan outdoor, dan homeschooling, yang menempatkan anak dan alam sebagai pusat dari proses belajar.

Maria Montessori. Konsep Montessori yaitu disebut “periode sensitif”. Yang menekankan perkembangan anak itu merupakan periode yang sangat penting. Pelatihan sensorik, motorik, bahasa dan sosial anak dapat diberikan pada masa periode sensitif ini, karena pada masa ini anak memiliki kesiapan tinggi untuk pembelajaran seperti pelatihan tersebut. selama masa peka anak harus diberikan alat permainan untuk membantu perkembangan potensi anak. Selama masa peka tersebut Montessori menyediakan bahan dan alat didaktik untuk anak-anak agar anak dapat memilih sendiri dan mengoreksi diri sendiri. Melalui ini anak-anak akan memilih kegiatannya sendiri sehingga memotivasi diri sendiri. Guru hanya tinggal membimbing muridnya. Dengan materi pendidikan yang dapat mengoreksi diri. Montessori berkeyakinan bahwa anak-anak akan menyadari kesalahannya sendiri sehingga mendorong anak untuk mencoba dan memperbaiki kesalahannya. Selain itu Montessori berkeyakinan bahwa dengan materi pendidikan anak yang mengoreksi diri akan melatih anak-anak dalam kemandirian dan kedisiplinan pada diri anak [12].

Implementasi Pemikiran Maria Montessori dalam Dunia Pendidikan yaitu (a) Lingkungan Belajar yang Disiapkan (*Prepared Environment*). Sekolah-sekolah Montessori menciptakan lingkungan yang tertata rapi, tenang, dan menarik secara visual. Semua alat dan bahan pembelajaran dirancang agar mudah diakses oleh anak, sehingga mereka dapat memilih aktivitas secara mandiri. Lingkungan ini membantu anak membentuk kemandirian, rasa tanggung jawab, dan disiplin diri. (b) Penggunaan Alat Didaktik Montessori. Montessori merancang berbagai alat peraga edukatif yang bersifat konkret dan dirancang untuk bisa memperbaiki kesalahan secara mandiri. Misalnya, balok

silinder, manik-manik angka, atau papan sandpaper huruf. Alat-alat ini membantu anak memahami konsep abstrak melalui pengalaman nyata dan merangsang semua indra dalam proses belajar. (c) Pembelajaran Mandiri dan Bebas Pilih (Self-directed Learning). Anak-anak diberi kebebasan untuk memilih kegiatan yang mereka minati dari berbagai pilihan yang tersedia. Mereka tidak dipaksa belajar dengan jadwal yang kaku, melainkan diberi waktu untuk menyelesaikan aktivitas dengan ritme mereka sendiri. Hal ini membentuk rasa percaya diri, kemandirian, dan motivasi intrinsik yang kuat. (d) Peran Guru sebagai Pembimbing, bukan Pengajar. Guru dalam pendidikan Montessori bukan pusat dari proses belajar. Mereka berperan sebagai fasilitator atau pengamat, yang membantu anak ketika dibutuhkan dan membiarkan anak mengalami proses belajarnya sendiri. Guru tidak mengoreksi secara langsung, tetapi memberi ruang agar anak menyadari kesalahan dan memperbaikinya secara mandiri. (e) Fokus pada Perkembangan Holistik Anak. Montessori tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga perkembangan emosional, sosial, dan spiritual anak. Setiap kegiatan diarahkan untuk membangun keterampilan hidup (life skills), seperti merawat diri, menghormati orang lain, serta bekerja sama dalam kelompok. (f) Multi-Age Classrooms (Kelas Campuran Usia). Dalam sistem Montessori, kelas biasanya terdiri dari anak-anak dengan rentang usia 3 tahun, misalnya usia 3–6 tahun, 6–9 tahun, dan seterusnya. Ini mendorong interaksi sosial yang sehat, kerja sama, serta kesempatan bagi anak yang lebih besar untuk membimbing anak yang lebih kecil.

Pendekatan Montessori telah diterapkan di seluruh dunia dan terbukti efektif dalam mengembangkan kemandirian, rasa tanggung jawab, kecintaan belajar, dan

kemampuan sosial anak. Bahkan hingga kini, banyak sekolah modern mengadopsi prinsip-prinsip Montessori dalam sistem pembelajarannya, karena pendekatan ini sangat relevan dalam membentuk generasi yang kreatif, berpikir kritis, dan tangguh menghadapi tantangan zaman.

Pendidikan merupakan suatu proses yang memiliki dimensi luas, mencakup seluruh aspek perkembangan manusia baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Dalam konteks teoritis, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sarana penyampaian pengetahuan, melainkan juga sebagai media pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral, serta pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Proses pendidikan mencakup unsur kesadaran diri, budaya, pengalaman langsung, serta pengaruh lingkungan yang secara integral membentuk kepribadian dan kompetensi seseorang.

Secara implementatif, pendidikan berlangsung dalam berbagai bentuk—baik formal, nonformal, maupun informal—dengan pendekatan yang adaptif terhadap dinamika zaman dan kebutuhan sosial masyarakat. Praktik pendidikan tidak terlepas dari kontribusi berbagai cabang ilmu, seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan antropologi. Masing-masing disiplin memberikan perspektif yang beragam dalam merancang sistem pendidikan yang kontekstual, efektif, dan berkelanjutan.

Pemikiran para tokoh pendidikan—baik dari dalam negeri seperti Ki Hajar Dewantara dan KH. Ahmad Dahlan, maupun tokoh dunia seperti John Dewey, Jean-Jacques Rousseau, Herman Horne, dan Maria Montessori—menunjukkan urgensi pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan, pengembangan potensi individu, serta

pentingnya pengalaman nyata dan kebebasan dalam proses belajar. Seluruh gagasan tersebut bermuara pada cita-cita bersama, yaitu membentuk manusia yang cerdas secara intelektual, luhur secara moral, mandiri secara sikap, serta mampu berperan secara harmonis dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban yang unggul dan beretika. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang selaras antara teori dan praktik, dibutuhkan sinergi yang terencana dan berkesinambungan dari seluruh komponen masyarakat—meliputi lembaga pendidikan, keluarga, pemerintah, dan komunitas—guna menciptakan generasi yang kompeten, berdaya saing tinggi, dan berkarakter mulia.

G. Daftar Pustaka

- [1] A. Karim Amarullah Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam Stai An-Nadwah Kuala Tungkal, “Dasar-dasar pendidikan.” [Daring]. Tersedia pada: www.ejournal.an-nadwah.ac.id
- [2] N. Doktor *dkk.*, “Pendidikan dalam Upaya memajukan teknologi,” 2013.
- [3] “Pengertian pendidika, ilmu pendidikan dan dasar pendidikan”.
- [4] A. Karim Amarullah Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, “Pendidikan karakter.” [Daring]. Tersedia pada: www.ejournal.an-nadwah.ac.id
- [5] J. Pendidikan dan D. Konseling, “Perbedaan Sistem Kurikulum Pendidikan Anggota Asean, Indonesia dan Singapura.”
- [6] “Pendidikan dan bimbingan konseling”.

- [7] “Paradigma ki hajar dewantara terhadap pengembangan pendidikan”.
- [8] T. Handayani dan A. Tinus, “Analisis konsep pemikiran ki hajar dewantara dalam perspektif pendidikan karakter,” vol. 1, no. 1, 2016, [Daring]. Tersedia pada: <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>
- [9] K. Rosika Dewi dan N. Istiq, “Pendidikan dalam pemikiran K. H. Ahmad Dahlan,” *Journal of Contemporary Issues in Primary Education (JCIPE)*, vol. 1, no. 2, hlm. 95–106, 2023.
- [10] “Eksistensi pemikiran john dewey dalam pendidikan di Indonesia”.
- [11] H. Aulia Farikha dkk., “Efektivitas Simulasi Mengajar Pendidikan Pancasila dalam Pengembangan Strategi Pembelajaran Inovatif untuk Kelas 2 SD Negeri Cangkiran 01 The Effectiveness of Pancasila Education Teaching Simulations in Developing Innovative Learning Strategies for Class 2 of SD Negeri Cangkiran 01,” *Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, hlm. 14–20, 2024, doi: 10.62383/kolaborasi.v2i4.312.
- [12] K. I. Ula, M. S. Sholehuddin, dan A. Khobir, “Filsafat pendidikan dalam pandangan maria montessori,” no. 4, hlm. 2024.

DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Perubahan perkembangan zaman yang terus berlangsung di Indonesia menjadikan pendidikan sebagai salah satu indikator dalam pencapaian peningkatan kualitas dan mutu pendidikan yang unggul dan berkualitas. Pendidikan sebagai dasar utama sebagai pondasi atau landasan yang kuat oleh setiap orang untuk melakukan perubahan. Seseorang dapat mencapai kesempurnaan hidup karena adanya pendidikan [1]. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam merubah kepribadian seseorang menjadi manusia yang lebih baik karena dengan pendidikan akan bisa berpikir maju dan berkembang [2], pendidikan dapat di peroleh di jenjang sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Selain jenjang sekolah, pendidikan juga dapat di peroleh dimana saja terutama di lingkungan sekitar [3]. Proses pendidikan bukan hanya tugas utama sekolah saja, melainkan semua unsur dapat mengembangkan proses kemajuan pendidikan seperti guru, guru bukan sebagai pengajar tetapi sebagai pendidik dan fasilitator siswa dalam membangun karakter serta sumber daya manusia yang berkualitas [1]. Pendidikan juga sebagai upaya dalam memanusiakan manusia untuk kemajuan bangsa. Pendidikan memiliki peranan penting dalam mencetak generasi yang unggul dan berkualitas. Jika proses pembentukan karakter tidak dapat berhasil, maka kemajuan bangsa dapat dipastikan akan sulit [4].

Pendidikan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, manusia dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan, menggali potensi, menumbuhkan bakat, serta memperoleh pengetahuan dan nilai-nilai yang diperlukan

dalam kehidupan bermasyarakat [5]. Selain dari ilmu pengetahuan, pendidikan juga memberikan dampak positif dalam aspek sosial kehidupan manusia diantaranya: (1) Mengurangi tingkat kemiskinan; (2) Meningkatkan pendapatan; (3) Mendukung terciptanya kesetaraan; (4) Meningkatkan taraf kesehatan ; (5) Mendorong pertumbuhan ekonomi; (6) Menumbuhkan kesadaran lingkungan [6]. Manusia juga menjadi inovasi dan kreatif dengan teknologi yang berkembang, mereka memiliki daya saing yang tinggi dalam berbagai sektor negara [7]. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 menyatakan tentang pendidikan nasional menekankan pada pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dasar pendidikan ini mencakup beberapa landasan yang sangat penting dalam merancang sistem pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Landasan ini mencakup landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, dan psikologis [8].

Dasar pendidikan juga harus didasarkan pada pandangan tentang hakikat manusia dan tujuan hidup. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk membantu manusia dalam mengembangkan segala kekuatan alam mereka secara optimal, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat [9]. Mengembangkan dan memahami pendidikan diperlukan strategi yang tepat. Strategi tersebut dapat diketahui oleh faktor internal seperti kecerdasan, minat dan bakat serta motivasi, sedangkan faktor eksternal bisa dari dukungan keadaan orang tua, kondisi sekolah, dan lingkungan masyarakat [6]. Hal ini diperlukannya standar pendidikan

dalam meningkatkan kualitas pendidikan, diantaranya diperlukannya pendidik, peserta didik, serta peran orang tua dan lingkungan yang dapat membantu kerjasama membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Pendidik merupakan kunci dalam proses keberhasilan pendidikan. Pendidik bertanggung jawab dalam proses pengembangan anak secara kognitif, psikomotorik, afektif, dan spiritualitatif.

Berlandasan pendidikan yang kuat, maka tujuan pendidikan dapat dirumuskan secara terarah dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan bangsa. Tujuan pendidikan merupakan arah terakhir dari proses pendidikan, dengan terbentuknya manusia yang memiliki kecakapan moralitas, cerdas, tanggung jawab terhadap lingkungan serta kecakapan sosial. Pendidikan juga harus mempersiapkan peserta didik yang baik, tidak hanya dapat menyesuaikan diri, tetapi juga menjadi pusat perubahan dalam pengembangan pengetahuan, pembentukan karakter, dan menjadikan manusia siap dalam menghadapi tantangan masa depan [10].

A. Definisi Pendidikan

Pendidikan terus berjalan dan mengalami perubahan seiring perkembangan jaman. Manusia dituntut untuk bisa berkembang dan maju dalam menyikapi tantangan perubahan global. Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia yang baik. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari sumber daya manusia yang bisa berkembang dengan pola pikir mereka yang kritis, memiliki karakter dan potensi yang baik, serta mengembangkan keterampilan yang dimiliki [2]. Pendidikan merupakan segala pengetahuan yang dipelajari terjadi sepanjang hayat (*long*

life education) dan dapat terjadi dimana pun serta dalam keadaan apapun yang mempengaruhi perubahan positif pada setiap pertumbuhan makhluk hidup.

Pendidikan juga membawa kita sebagai humanisme atau dikenal dengan istilah sebagai memanusiakan manusia seperti saling menghormati, menghargai hak asasi oleh setiap manusia. Peserta didik merupakan generasi penerus yang perlu kita bimbing dalam membentuk individu yang berpikir kritis, berakhlak yang baik, dan mandiri pada setiap perubahan menuju pendewasaan diri [11]. Pada dasarnya peserta didik dalam pembelajaran mereka merupakan sebagai *student centered learning*, dimana peserta didik dapat melakukan eksplorasi, diskusi, serta dapat mengembangkan ide-ide kreativitas mereka. Peserta didik memperoleh pendidikan tidak hanya dimaknai dengan perolehan penyampaian informasi dan pembentukan keterampilan saja, melainkan mencakup segala upaya yang lebih luas dalam mengembangkan potensi individu secara menyeluruh seperti mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik dapat mampu mencapai kualitas pendidikan secara optimal yang dapat diperoleh secara personal maupun sosial [12] .

B. Dasar Pendidikan

Pendidikan dapat dipandang salah satu sebagai bentuk investasi jangka panjang yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi individu secara personal, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat dan negara secara luas [13]. Profesi merujuk pada suatu pekerjaan atau posisi yang membutuhkan keahlian khusus,

tanggung jawab yang tinggi, serta komitmen terhadap nilai-nilai profesionalisme. Secara konseptual, suatu profesi tidak dapat dijalankan oleh sembarang individu tanpa memiliki kompetensi yang sesuai. Di era perkembangan abad ke-21, peserta didik dituntut untuk menjadi pribadi yang unggul, produktif, dan mampu berperan aktif sebagai warga negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi [14]. Hal ini bertujuan agar mereka dapat terlibat dalam pembangunan global yang berkelanjutan, serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul seiring dengan kemajuan zaman [15].

C. Landasan Teoritis pendidikan

Landasan dasar pendidikan yang memiliki pondasi kuat dalam mencapai pendidikan yang lebih baik. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam mencapai proses belajar sehingga peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya [16]. Pada praktiknya dalam pendidikan memerlukan dasar atau landasan yang menjadi pusat tujuan arah, kebijakan, dan menjalankan pendidikan menjadi selaras dengan tujuan pembangunan manusia seutuhnya [17]. Dasar pendidikan meliputi nilai, prinsip, dan norma yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan menjadi relevan sesuai kebutuhan individu dan masyarakat. Dasar pendidikan tidak hanya sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan, tetapi juga memberikan kajian teoritis dalam menjelaskan mengapa dan bagaimana pendidikan diselenggarakan [18].

Dasar pendidikan mencerminkan landasan-landasan teoritis seperti filosofis, yuridis, psikologis, dan sosiologis. Semua landasan ini saling berkesinambungan karena semua aspek di dalamnya mencakup kurikulum, metode pengajaran, sampai dengan evaluasi pembelajaran. Dasar

pendidikan merupakan kunci utama dalam penembangan sistem pendidikan yang relevan dan berkelanjutan [19].

a. Landasan Filosofis

Dasar filosofis pendidikan mengacu pada pemikiran dan pandangan nilai-nilai dasar yang memiliki makna, hakikat, dan tujuan. Landasan filosofis pendidikan membantu pencapaian tujuan, kurikulum, dan metode pengajaran telah disesuaikan dengan visi dan nilai-nilai filosofis yang telah dianut. Dalam perspektif filsafat, pendidikan tidak dapat terlepas dari pandangan terkait manusia (antropologi), pengetahuan (epistemologi), nilai (aksiologi), dan realitas (ontologi) [20]. Pandangan terkait manusia (antropologi) merupakan kajian yang membahas hakikat dan eksistensi manusia, bukan hanya mereka sebagai makhluk biologi, tetapi juga sebagai manusia yang harus berpikir, bermoral, sosial, dan spiritual. Antropologi berupaya memahami manusia secara seutuhnya bukan hanya dari aspek fisik tetapi juga eksistensial dan metafisik. Pandangan pengetahuan (epistemologi) membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, hal-hal yang perlu diperhatikan agar pengetahuan yang diperoleh benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Epistemologi ini juga membahas mengenai makna kebenaran serta kriteria yang digunakan untuk menilainya. Objek pembahasannya mencakup pertanyaan tentang asal usul suatu pengetahuan, cara kita mengetahui sesuatu, dan bagaimana membedakan dari hal lain. Dengan demikian, epistemologi memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi ruang dan waktu dari suatu kejadian. Tujuan utama dari kajian ini untuk memahami bagaimana hal ini terjadi, bagaimana cara kita mengenalinya, membedakan dari hal lain, serta memahami keadaan dan konteksnya dalam ruang dan waktu tertentu. Pandangan nilai

(aksiologi) membahas tentang persoalan yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual, yang bertujuan menguji dan menyelaraskan nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Proses ini mencakup upaya memelihara dan membentuk karakter individu. Nilai-nilai yang berkembang dalam sistem sosial masyarakat dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu nilai ilahiyah dan insaniyah. Ilahiyah yaitu berkaitan dengan wahyu ketuhanan yang disampaikan melalui para nabi yang di dalamnya mencakup ketakwaan, keimanan, dan keadilan. Nilai-nilai ini bersifat kekal dan abadi karena bersumber dari wahyu. Insaniyah yaitu nilai-nilai yang muncul dari hasil kesepakatan manusia dan tumbuh bersama perkembangan peradaban. Nilai-nilai ini bersifat fleksibel dan terus berubah, serta kebenarannya bersifat relatif bergantung pada ruang dan waktu. Pandangan realitas (ontologi) membahas hakikat pendidikan, ontologi memberikan dasar konseptual bagi pengetahuan dan cara memahaminya secara menyeluruh dan realitas [21].

Landasan filosofis pendidikan ini mencakup ilmu dan hakekat pengetahuan yang dikaitkan dengan tujuan, analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Filosofis pendidikan dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pendidikan di Indonesia merupakan pondasi hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional. Landasan yuridis ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan menetapkan kewajiban negara dalam menyelenggarakan sistem

pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana guna menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk membentuk kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian yang matang, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupannya, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai bagian dari bangsa dan negara [20].

Landasan yuridis ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan seperti ketimpangan akses pendidikan, kualitas pendidikan yang belum merata, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi pendidikan menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa landasan yuridis yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif.

c. Landasan Historis

Pendidikan di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan kaya, yang terbentuk dari berbagai fase peradaban, mulai dari masa tradisional, kolonial, hingga era kemerdekaan dan reformasi. Landasan historis ini bukan hanya mencerminkan perkembangan sistem pendidikan dari

waktu ke waktu, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional saat ini. Pada masa tradisional Pendidikan berpusat pada budaya dan agama. Proses pendidikan dilakukan di lingkungan keluarga dan komunitas melalui adat istiadat serta nilai-nilai spiritual. Di era Hindu-Buddha, pendidikan tersentralisasi di pusat-pusat keagamaan seperti vihara dan asrama, sementara pada masa masuknya Islam, pesantren menjadi lembaga pendidikan utama. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup dan etika sosial. Sistem pendidikan pesantren menjadi akar penting dalam membentuk karakter bangsa, karena mengajarkan kemandirian, kesederhanaan, dan nilai-nilai moral yang kuat [22].

Masuknya kolonialisme Belanda membawa sistem pendidikan formal yang terstruktur, tetapi bersifat eksklusif dan diskriminatif. Pendidikan pada masa ini bertujuan menciptakan tenaga kerja yang patuh terhadap kepentingan kolonial. Lembaga pendidikan seperti HIS dan ELS hanya terbuka untuk kelompok tertentu. Namun, kondisi ini mendorong munculnya tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, yang mendirikan Taman Siswa sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang memerdekakan dan berakar pada budaya bangsa. lembaga pendidikan alternatif seperti Taman Siswa menjadi cikal bakal sistem pendidikan nasional yang berbasis nilai dan kebudayaan local [23]. Pada era reformasi, pendidikan mengalami desentralisasi untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam pengelolaannya. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi kebutuhan lokal dan meningkatkan efisiensi pelayanan pendidikan. Namun, tantangan muncul

dalam bentuk ketimpangan kualitas antar daerah dan lemahnya kapasitas pengelolaan di beberapa wilayah. Landasan historis pendidikan Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dalam mencari bentuk ideal pendidikan nasional. Dari sistem adat, pesantren, hingga pendidikan modern dan desentralisasi, semuanya memberikan pelajaran penting bahwa pendidikan bukan sekadar proses belajar, tetapi alat strategis dalam membentuk peradaban bangsa. Memahami sejarah pendidikan sangat penting agar kebijakan ke depan tetap relevan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

d. Landasan Psikologis

Landasan psikologis dalam pendidikan mengacu pada penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami perilaku, perkembangan, dan kebutuhan individu dalam konteks belajar [24]. Dengan memahami aspek ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Setiap individu mengalami tahapan perkembangan yang unik, baik secara fisik, kognitif, maupun emosional. Pemahaman terhadap psikologi perkembangan memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Misalnya, pendekatan pembelajaran untuk siswa sekolah dasar berbeda dengan siswa sekolah menengah, karena perbedaan dalam kemampuan berpikir abstrak dan konkret [25]. Dengan demikian, penyesuaian strategi pembelajaran berdasarkan tahap perkembangan siswa menjadi penting untuk efektivitas Pendidikan [26].

Psikologi belajar berfokus pada bagaimana individu memperoleh, memproses, dan mengingat informasi. Dengan memahami teori-teori belajar, seperti behaviorisme,

kognitivisme, dan konstruktivisme, pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan cara belajar siswa. Misalnya, penerapan reinforcement dalam teori behaviorisme dapat meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemberian penghargaan atas pencapaian tertentu [27]. Sementara itu, pendekatan konstruktivis mendorong siswa untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman dan refleksi. Landasan psikologis juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Lingkungan yang positif dapat meningkatkan kesejahteraan emosional siswa, yang pada gilirannya berdampak pada motivasi dan prestasi belajar. Guru berperan penting dalam menciptakan atmosfer kelas yang aman dan suportif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung [28]. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif, empati, dan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Pengembangan kurikulum yang efektif harus mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik. Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan belajar siswa, kurikulum dapat dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran yang optimal. Misalnya, materi pelajaran disusun secara spiral, dimulai dari konsep sederhana menuju konsep yang lebih kompleks, sesuai dengan kemampuan kognitif siswa. Selain itu, integrasi kegiatan yang melibatkan aspek afektif dan psikomotorik dapat memperkaya pengalaman belajar siswa [29].

D. Tujuan Pendidikan

Pendidikan di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tujuan pendidikan nasional tidak hanya terfokus pada pencapaian

akademik semata, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan abad ke-21, dan kesiapan menghadapi tantangan global. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kebijakan "Merdeka Belajar" yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran, mendorong inovasi, kreativitas, dan kemandirian dalam belajar [30].

Dengan demikian, tujuan pendidikan di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan abad ke-21, dan kesiapan menghadapi tantangan global. Melalui berbagai kebijakan dan program strategis, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang unggul, adaptif, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Tujuan Pendidikan secara umum dapat diketahui dari: (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 dimana pendidikan bertujuan untuk menderdaskan kehidupan dan mengembangkan manusia seutuhnya. (2) Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

E. Ideologi Pendidikan

Selain itu tujuan pendidikan memiliki aliran ideologi pendidikan diantaranya yaitu ideologi fundamentalisme, ideologi intelektualisme, ideologi konservatisme, ideologi liberalisme, dan ideologi anarkisme.

a. Ideologi Fundamentalisme

Fundamentalisme dalam konteks pendidikan dapat dilihat pada pendekatan yang menekankan ketaatan mutlak terhadap ajaran-ajaran dasar suatu agama atau ideologi tertentu. Dalam pendekatan ini, pendidikan dipandang sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai absolut yang dianggap tidak dapat diganggu gugat, dengan tujuan utama membentuk individu yang sepenuhnya tunduk pada prinsip-prinsip tersebut. Fundamentalisme merupakan suatu ideologi yang memiliki gagasan berdasarkan logika rasional. Dalam konteks ini, gagasan atau makna yang terkandung dalam ideologi tersebut berperan dalam membentuk cara berpikir dan bertindak individu maupun kelompok, yang pada akhirnya membentuk tatanan sosial. Oleh karena itu, studi tentang bahasa memperoleh peran penting, karena bahasa memiliki kemampuan untuk menggerakkan individu atau kelompok dalam ranah sosial. Sebagai sistem simbolik, ideologi juga berkaitan erat dengan tindakan sosial. Contohnya, wacana permusuhan dan sikap konfrontatif yang diusung oleh kelompok Islam "radikal" terhadap agama Kristen dan Yahudi bukan hanya mencerminkan cara pandang mereka terhadap kedua agama tersebut, tetapi juga mengandung potensi tersembunyi yang dapat memicu konflik dan kekerasan kapan saja [31].

Dengan kata lain, ideologi memainkan peran krusial dalam membentuk arah serta tujuan tindakan kolektif anggota suatu kelompok, sehingga gerakan mereka menjadi lebih sistematis dan terfokus. Oleh karena itu, gerakan yang dilandasi oleh ideologi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan gerakan yang bertumpu pada kepentingan kelas sosial. Jika perlawanan kelas cenderung mereda setelah tuntutan ekonomi-politik terpenuhi, maka perlawanan ideologis justru terus berkembang, menggali dan mempertajam dimensi-dimensi ideologis dari keyakinan yang dianggap sebagai kebenaran mutlak, yang terus-menerus dijunjung dan diperjuangkan. Sebelum masuk lebih dalam ke dalam pembahasan mengenai fundamentalisme, penting untuk terlebih dahulu memahami definisi dasar yang dapat membantu memetakan isu yang sedang dianalisis. Istilah fundamentalisme sendiri memiliki beragam makna, yang kadang tidak jelas atau bahkan sengaja dibuat ambigu. Hal ini karena pemaknaan terhadap fundamentalisme sangat dipengaruhi oleh konteks sosial di mana ia muncul. Istilah ini bersifat fleksibel dalam penafsiran—terkadang dilihat dari sudut pandang sosiologis, namun tidak jarang pula ditafsirkan secara ideologis dan teologis [31].

b. Ideologi Intelektualisme

Ideologi intelektualisme merupakan salah satu ideologi pendidikan yang menempatkan akal dan nalar sebagai instrumen utama dalam proses pembelajaran. Dalam pandangan ini, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi intelektual individu secara menyeluruh, membentuk kemampuan berpikir kritis, serta membekali peserta didik dengan wawasan keilmuan yang mendalam dan etika keilmuan yang kokoh. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pencapaian kognitif, tetapi juga pembentukan

pribadi yang rasional, terbuka, dan bertanggung jawab secara intelektual. Ideologi intelektualisme berpijak pada prinsip etika pribadi yang bersifat terbuka dan universal. Sebagian besar penganut pandangan ini meyakini bahwa pengembangan kecerdasan melalui pelatihan merupakan cara alami dan paling efektif untuk membimbing individu menuju pencerahan, baik secara filosofis maupun religius. Tujuan utamanya adalah menciptakan individu yang tercerahkan dan memiliki kesadaran diri yang tinggi. Individu-individu semacam inilah yang dianggap layak untuk memimpin negara, karena mereka dipercaya mampu mengelola sistem pendidikan. Dengan mereka mengendalikan pendidikan, proses mencerdaskan generasi berikutnya pun berada dalam kendali mereka.

Dalam tujuan ideologi ini, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membantu setiap individu mencapai potensi maksimalnya. Mereka yang berhasil mengembangkan kualitas moral dan intelektual secara optimal dianggap pantas untuk memegang kekuasaan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, sekolah sebagai salah satu pilar penting negara, wajib menyediakan pendidikan yang merata dan sesuai bagi seluruh Masyarakat [32]. Ideologi ini menekankan pentingnya kurikulum pendidikan yang berorientasi pada pembentukan daya kritis, kreativitas, dan kemampuan reflektif. Kurikulum tidak semata-mata diarahkan pada penguasaan materi akademik, tetapi juga diarahkan pada pembinaan sikap intelektual yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, pendidikan dalam bingkai intelektualisme bertujuan melahirkan warga negara yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian terhadap permasalahan kemanusiaan.

Ideologi intelektualisme juga menekankan pentingnya kesetaraan akses terhadap pendidikan. Dalam pandangan ini, pendidikan bukanlah hak istimewa segelintir kalangan, melainkan hak fundamental setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, agar setiap warga memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensi intelektualnya. Kesadaran akan pentingnya pemerataan ini merupakan wujud dari komitmen terhadap prinsip keadilan sosial, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai dasar negara hukum yang demokratis. Namun, penerapan ideologi intelektualisme tidak terlepas dari tantangan. Di tengah dominasi ideologi pragmatis yang lebih menekankan pada hasil instan dan kepentingan pasar, idealisme intelektualisme sering kali terpinggirkan. Banyak institusi pendidikan lebih fokus pada pencapaian angka-angka statistik daripada pada pengembangan kualitas berpikir dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya konsisten dari seluruh elemen bangsa—baik pemerintah, pendidik, maupun masyarakat—untuk menghidupkan kembali semangat intelektualisme dalam praktik pendidikan sehari-hari. Hanya dengan komitmen kolektif ini, visi pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia paripurna yang tercerahkan dan bermoral tinggi dapat benar-benar terwujud.

c. Ideologi Konservatisme

Pandangan ideologi konservatisme, tujuan utama pendidikan adalah untuk mempertahankan, mentransmisikan, dan melestarikan nilai-nilai, tradisi, serta norma-norma sosial yang telah terbukti stabil dan berguna dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai

instrumen penting dalam membentuk individu yang taat pada tatanan sosial yang ada, menghargai otoritas, serta menjunjung tinggi etika dan moralitas yang berlaku. Konservatisme menekankan pentingnya kesinambungan budaya dan kepercayaan bahwa perubahan sosial harus berlangsung secara bertahap dan hati-hati, bukan melalui revolusi atau eksperimen radikal dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menurut konservatisme tidak diarahkan pada transformasi sosial yang cepat, tetapi pada pembentukan karakter dan kedisiplinan individu yang sesuai dengan norma masyarakat. Kurikulum dalam kerangka ini cenderung bersifat tradisional dan menekankan penguasaan pengetahuan dasar, sejarah, bahasa, agama, serta nilai-nilai kebudayaan lokal. Guru dipandang sebagai figur otoritatif yang bertugas menanamkan nilai-nilai tersebut secara sistematis dan konsisten kepada peserta didik. Tujuan akhirnya adalah menciptakan warga negara yang stabil secara emosional, beretika, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negaranya. Dalam konteks ini, pendidikan juga dianggap berperan penting dalam menjaga integrasi sosial dan memperkuat identitas nasional. Dengan demikian, konservatisme melihat pendidikan sebagai fondasi penting dalam merawat warisan intelektual dan moral suatu bangsa, sekaligus sebagai sarana untuk menyiapkan generasi penerus yang setia pada prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama [33].

Konservatisme juga menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam membentuk karakter dan moralitas peserta didik. Pendidikan tidak hanya difokuskan pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan aspek afektif dan psikomotorik, guna menciptakan individu yang seimbang dan berbudaya. Dalam konteks ini, guru dianggap

sebagai figur otoritatif yang bertugas menanamkan nilai-nilai tersebut secara sistematis dan konsisten kepada peserta didik. Tujuan pendidikan menurut ideologi konservatisme adalah membentuk individu yang mampu mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai tradisional, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Pendidikan dilihat sebagai proses yang harus dijalankan dengan hati-hati, menghargai warisan budaya, dan menolak perubahan yang bersifat revolusioner. Salah satu prinsip utama konservatisme dalam pendidikan adalah bahwa kebenaran dan nilai moral bersifat tetap dan objektif. Pendidikan bertugas untuk mentransmisikan nilai-nilai tersebut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pandangan ini, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai figur otoritatif yang bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membimbing perilaku dan karakter siswa. Proses belajar-mengajar bukan hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan aspek afektif dan moral.

d. *Ideologi Anarkisme*

Ideologi anarkisme, tujuan pendidikan adalah membebaskan individu dari berbagai bentuk penindasan struktural, baik itu negara, otoritas yang represif, maupun sistem sosial yang hierarkis. Pendidikan dipandang sebagai alat untuk membentuk manusia yang otonom, kritis, dan mampu berpikir bebas tanpa tunduk pada dogma atau kekuasaan yang mengekang kebebasan individu. Anarkisme menolak pendidikan yang bersifat indoktrinatif dan mempromosikan model pendidikan yang egaliter, partisipatif, dan berbasis pada solidaritas serta kerja sama. Melalui pendidikan, anarkisme bertujuan membangun masyarakat yang bebas dari dominasi, di mana setiap

individu memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan berkontribusi dalam komunitas secara sukarela dan setara. Pendidikan anarkisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang egaliter melalui proses belajar yang partisipatif dan non-hierarkis. Ia berpendapat bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk individu yang mampu berpikir kritis dan bertindak secara mandiri dalam komunitasnya [34].

Pendidikan anarkis menolak model pendidikan yang bersifat indoktrinatif dan koersif. Sebaliknya, ia mendorong pembelajaran yang berbasis pada kerja sama, solidaritas, dan kebebasan individu. Hal ini tercermin dalam pendekatan pedagogis yang menekankan pada dialog, partisipasi aktif, dan penghargaan terhadap pengalaman serta perspektif setiap peserta didik. Dengan demikian, tujuan pendidikan dalam ideologi anarkisme adalah membentuk individu yang tidak hanya bebas secara intelektual, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan bebas dari struktur kekuasaan yang menindas. Pendidikan menjadi sarana untuk membangun kesadaran kritis dan kapasitas kolektif dalam mewujudkan transformasi sosial yang berkelanjutan.

Dari beberapa ideologi yang telah di jelaskan maka tujuan Pendidikan yang lebih baik untuk diterapkan adalah ideologi konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pendekatan pedagogis (bukan sekadar ideologi politik) yang sangat aplikatif di ruang kelas, menekankan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman, eksplorasi, dan refleksi. Cocok dengan kurikulum modern (misalnya Kurikulum Merdeka di Indonesia) yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, berpikir

kritis, dan pemecahan masalah. Keunggulan dari ideologi konstruktivisme adalah mendorong partisipasi aktif siswa, guru berperan sebagai fasilitator, bukan otoritas Tunggal, menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa.

Pendidikan merupakan proses yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk kepribadian, karakter, dan tatanan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, memahami dasar dan tujuan pendidikan sangatlah penting dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermakna, berkelanjutan, dan berdampak luas. Secara filosofis, pendidikan memiliki tiga landasan utama: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Landasan ontologis berkaitan dengan pandangan tentang hakikat manusia dan eksistensinya. Pendidikan dilandaskan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang dapat berkembang dan memiliki potensi yang dapat dibina melalui proses belajar. Sementara itu, landasan epistemologis berkaitan dengan cara manusia memperoleh pengetahuan, yang kemudian memengaruhi metode pengajaran dan strategi pembelajaran yang digunakan di sekolah. Sedangkan landasan aksiologis menyentuh aspek nilai, moral, dan tujuan akhir dari pendidikan, seperti pembentukan karakter, etika, dan kontribusi sosial.

Secara yuridis dan sosiologis, pendidikan didasarkan pada kebutuhan negara dan masyarakat dalam menciptakan warga negara yang cerdas, mandiri, serta berdaya saing tinggi. Di Indonesia, dasar hukum pendidikan diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pendidikan memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan adalah untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Sementara itu, tujuan khusus pendidikan disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, seperti pendidikan dasar yang menekankan pada pembentukan fondasi karakter dan keterampilan dasar, serta pendidikan menengah dan tinggi yang lebih menekankan pada pendalaman ilmu dan keahlian tertentu.

Selain itu, pendidikan juga berperan sebagai agen transformasi sosial. Pendidikan mampu menjadi alat perubahan yang efektif dalam menanggulangi kemiskinan, kesenjangan sosial, serta membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu, dalam konteks global dan abad ke-21, tujuan pendidikan harus mencakup penguatan kompetensi seperti berpikir kritis, kemampuan beradaptasi, literasi digital, dan kerja sama lintas budaya. Berbagai pendekatan ideologis dalam pendidikan seperti anarkisme, liberalisme, konstruktivisme, hingga sosialisme, masing-masing menawarkan kontribusi yang signifikan terhadap perumusan tujuan pendidikan. Namun, pendekatan yang paling efektif adalah yang bersifat integratif dan kontekstual, yakni menggabungkan nilai-nilai filosofis, sosiokultural, dan kebutuhan praktis masyarakat. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan manusia, karena ia berakar dari kebutuhan dasar manusia untuk tumbuh, belajar, dan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam

setiap sistem pendidikan yang baik, perlu dirumuskan dasar yang kuat dan tujuan yang jelas. Dasar pendidikan berfungsi sebagai fondasi filosofis dan ideologis yang memberi arah bagi setiap kebijakan, strategi, dan metode pembelajaran. Sementara itu, tujuan pendidikan menjadi arah utama yang ingin dicapai dari seluruh proses pendidikan itu sendiri.

Salah satu elemen terpenting dalam dasar pendidikan adalah pandangan tentang manusia (antropologis). Pendidikan berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang dapat belajar, memiliki potensi untuk berkembang, dan mampu membentuk dirinya sendiri serta lingkungannya. Oleh karena itu, sistem pendidikan dirancang untuk menstimulasi potensi tersebut agar berkembang secara optimal. Hal ini selaras dengan pendekatan konstruktivisme, yang menekankan bahwa peserta didik adalah subjek aktif dalam proses belajar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang ideal harus dibangun atas dasar filosofis yang kuat dan ditujukan untuk membentuk manusia seutuhnya—yakni individu yang berpikir kritis, bermoral, mandiri, serta mampu berkontribusi secara positif bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan peradaban dunia.

F. Daftar Pustaka

- [1] I. Purwaningsih, O. Oktariani, L. Hernawati, R. Wardarita, and P. I. Utami, "Pendidikan sebagai suatu sistem," *J. Vision. Penelit. Dan Pengemb. Dibidang Adm. Pendidik*, vol. 10, no. 1, pp. 21–26, 2022.
- [2] R. Juwita, "Artikel Konsep Dasar Pendidikan," 2019.
- [3] S. Z. H. Harahap, "Fungsi dan Peranan Lembaga Pendidikan," *Pengantar Pendidik*, vol. 31, 2022.
- [4] W. A. Ratnaningrum, "Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional," *Educ. Technol. J.*, vol. 2, no. 2, pp. 22–28, 2022, doi: 10.26740/etj.v2n2.p22-28.
- [5] Y. Syamsul, R. Widodo, and A. Tinus, "Peranan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam Pembentukan Moral Peserta Didik," *J. Civ. Huk.*, vol. 2, no. 1, p. 36, 2017, doi: 10.22219/jch.v2i1.9902.
- [6] B. A. Habsy, D. P. Sari, T. A. Sekarani, and N. Elisa, "Konsep Dasar Ilmu Pendidikan," *J. Penelit. Pendidik. Indones.*, vol. 2, pp. 108–122, 2024.
- [7] A. Schleicher, *World Class: How to Build a 21st-Century School System*. 2018. doi: 10.1787/9789264300002-en.
- [8] M. Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smk Pusat Keunggulan Smk Muhammadiyah Sintang," *J. Ilmu Pendidik. dan Kearifan Lokal (JIPKL)*, vol. 3, no. Januari, pp. 1–13, 2023.
- [9] S. Sukri, T. Handayani, and A. Tinus, "Analisis Konsep Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dalam Perspektif Pendidikan Karakter," *J. Civ. Huk.*, vol. 1, no. 1, p. 33, 2016, doi: 10.22219/jch.v1i1.10460.
- [10] V. No, O. Desember, P. Di Sekolah, A. Agung, S. Oka, and A. M. Putri, "Penerapan Dasar Dan Tujuan Pendidikan

- Untuk Meningkatkan Kualitas,” vol. 2, no. 3, pp. 919–922, 2024.
- [11] J. Pendidikan and D. Konseling, “Pengertian Pendidikan.”
 - [12] A. Rahman, S. A. Munandar, A. Fitriani, Y. Karlina, and Yumriani, “Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan,” *Al Urwatul Wutsqa Kaji. Pendidik. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 1–8, 2022.
 - [13] Liliana Fernandes, “The economics of human development: ‘Investing in children’ or ‘children as an investment’? And why it matters,” *Contemp. Issues Early Child.*, p. 14639491241268126, Aug. 2024, doi: 10.1177/14639491241268126.
 - [14] I. Darmawan and A. Tjalla, “Character Education to Respond to the 21st Century Skills Challenges: A Review,” *J. Eval. Pendidik.*, vol. 12, no. 2, pp. 51–59, 2021, [Online]. Available: <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jep/article/view/23050>
 - [15] M. H. Purnomo, *Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia*, vol. 11, no. 1. 2017. [Online]. Available: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Bene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
 - [16] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.”

- [17] K.- Kustiarini and P.- Prasetyo, "Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Metode Role Playing Bagi Siswa Kelas Iv Sd," *DIKDAS MATAPPA J. Ilmu Pendidik. Dasar*, vol. 1, no. 1, p. 65, 2018, doi: 10.31100/dikdas.v1i1.213.
- [18] D. R. I. Disma, A. Aunurrahman, H. Halida, and F. Sulistiyaningrum, "Memahami Landasan Pendidikan Dalam Mengoptimalkan Proses Belajar-Mengajar Bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan," *Acad. Educ. J.*, vol. 14, no. 2, pp. 1547–1556, 2023, doi: 10.47200/aoej.v14i2.2139.
- [19] Nurhuda, *Landasan Pendidikan Nurhuda*. 2022.
- [20] D. D. Aulia, R. P. Maulidi, M. Marjohan, S. Hidayat, and R. S. Dewi, "Landasan Filosofis Pendidikan," *J. Educ.*, vol. 5, no. 1, pp. 432–441, 2022, doi: 10.31004/joe.v5i1.630.
- [21] L. Luthfiyah and A. Lhobir, "Ontologi , Epistimologi dan Aksiologi Filsafat Pendidikan," *J. Basicedu*, vol. 7, no. 5, pp. 3249–3254, 2023, doi: 10.31004/basicedu.v7i5.6150.
- [22] D. E. Hardika and Binti Maunah, "Dasar-dasar Histori Pendidikan di Indonesia," *Edudikara J. Pendidik. dan Pembelajaran*, vol. 8, no. 2, pp. 64–78, 2024, doi: 10.32585/edudikara.v8i2.336.
- [23] B. A. Habsy *et al.*, "Landasan Historis Pendidikan Indonesia : dari Masa Penjajahan Sampai Kemerdekaan," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 8, no. 1, pp. 4672–4685, 2024.
- [24] Cut Mayang ramadhani, Wirdatul Jannah, Darmansyah Sitompul, and Putri Ani Dalimunthe, "Psikologi Pendidikan Sebagai Landasan Pendidikan," vol. 3, pp. 91–100, 2024.

- [25] R. Kumar Shah Associate Professor, "Psychological Foundation of Learner Centered Teaching," *Int. J. All Res. Educ. Sci. Methods*, vol. 8, no. 11, pp. 2455–6211, 2020.
- [26] L. Yuliawati, "Pentingnya Landasan Psikologis dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan," *Inov. Kurikulum*, vol. 5, no. 1, pp. 99–112, 2021, doi: 10.17509/jik.v5i1.35627.
- [27] F. Tonneau, "The Concept of Reinforcement: Explanatory or Descriptive," vol. 96, pp. 87–96, 2008.
- [28] D. D. Febriani *et al.*, "Analisis Lingkungan Positif dalam Mendukung Pembelajaran Efektif dan Pengelolaan Kelas yang Harmonis di SMA Negeri 1 Gedeg," no. 1, 2025.
- [29] A. R. Lingkup, L. Psikologis, and P. Pendidikan, "Landasan psikologis kependidikan," 2009.
- [30] A. Ansori, F. Putridianti, B. Mudarris, and S. Suhermanto, "2," *Jump. J. Manaj. Pendidik.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–13, 2022, doi: 10.33650/jumpa.v3i1.5390.
- [31] H. Mahmudah, "Transmisi Ideologi Fundamentalisme Dalam Pendidikan," *TAJDID J. Pemikir. Keislam. dan Kemanus.*, vol. 1, no. 2, pp. 200–216, 2017, doi: 10.52266/tadjid.v1i2.45.
- [32] A. S. Hani Handayani, "Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah," *J. Ilm. Aset*, vol. 7, no. 1, pp. 24–33, 2019.
- [33] R. Rahmaniar and M. Mardi, "Ideologi Konservatisme Dalam Pendidikan Seni Musik," *Tonika J. Penelit. dan Pengkaj. Seni*, vol. 2, no. 2, pp. 38–48, 2019, doi: 10.37368/tonika.v2i2.108.

- [34] M. HAWORTH, "Anarchist Pedagogies: Critical Reflections on Education Collective Actions, Theories, and," *Neurotechnology End Finitude*, no. August, pp. 1–12, 2018.

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: TANTANGAN DAN ARAH PENGEMBANGAN

Pendidikan adalah kunci utama dalam pembangunan sebuah negara [1] [2]. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan ketrampilan individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial [3]. Di Indonesia, sistem pendidikan nasional dirancang untuk menciptakan generasi yang cerdas, terampil dan berkarakter [4] [5]. Namun, gambaran umum sistem pendidikan saat ini menunjukkan adanya berbagai tantangan yang harus dihadapi. Menurut data kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2022, pendidikan berkualitas tinggi masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang [6].

Pendidikan baik dalam hal fasilitas maupun tenaga pendidik yang berkualitas [7]. Data menunjukkan bahwa rasio guru terhadap siswa di beberapa daerah masih jauh dari ideal, dengan beberapa daerah di Indonesia memiliki rasio 1:40 (BPS, 2021) Selain itu kurikulum yang tidak selalu relevan dengan dunia kerja juga menjadi masalah yang signifikan, yang berpotensi mengurangi daya saing lulusan di pasar global [8].

Berdasarkan hal-hal tersebut, beberapa hal yang akan dibahas yakni pertama, tantangan utama apa saja dalam sistem pendidikan nasional kita. Tantangan ini tidak hanya mencakup aspek akses dan kualitas Pendidikan, tetapi juga relevansi kurikulum, pelatihan guru, dan dukungan teknologi dalam proses belajar mengajar. Kedua, solusi yang seperti

apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas sistem pendidikan nasional. Solusi ini perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat dan sector swasta, untuk menciptakan ekosistem Pendidikan yang lebih baik.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan nasional di Indonesia serta menawarkan solusi dan arah pengembangan yang sesuai. Dengan memahami tantangan saat ini, diharapkan solusi strategis dapat ditemukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan bagi pembaca mengenai pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan yang ada.

A. Struktur dan Regulasi Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa pendidikan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa semua bagian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil, memperoleh akses pendidikan yang layak dan memadai [9].

Dalam praktiknya, dasar hukum yang telah ditetapkan ini diikuti oleh berbagai peraturan pelaksana yang lebih spesifik dan terperinci. Di antara peraturan tersebut, terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan yang memiliki peranan penting. Salah satu contoh yang dapat disebutkan adalah Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, yang secara khusus mengatur mengenai standar proses pendidikan yang harus dipatuhi. Hal ini mencerminkan bahwa regulasi yang mengatur sektor pendidikan di Indonesia memiliki sifat yang dinamis dan selalu mengalami pembaruan. Pembaruan ini dilakukan untuk dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya sekadar mengikuti arus, tetapi juga berusaha untuk beradaptasi dan relevan dengan tuntutan serta harapan masyarakat. [10] [11].

Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami serangkaian perubahan yang signifikan sepanjang sejarahnya, dan salah satu perubahan yang paling menonjol adalah penerapan kurikulum 2013. Kurikulum ini dirancang dengan pendekatan yang tematik dan integratif, yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi siswa dalam berbagai aspek, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap [12]. Meskipun demikian, pelaksanaan kurikulum ini tidak berjalan mulus dan masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius. Beberapa kritik yang muncul menunjukkan bahwa terdapat kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan para guru mengenai kurikulum ini, serta adanya keterbatasan dalam sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasinya secara efektif [13].

Standar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum memiliki peranan yang sangat krusial dan perlu mendapatkan perhatian serius. Mengacu pada data yang

dirilis oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), tampak adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara standar yang telah ditetapkan dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Sebagai ilustrasi, berdasarkan laporan BSNP pada tahun 2020, dalam pelaksanaan ujian nasional, sejumlah besar siswa tidak mampu mencapai standar kelulusan yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh para siswa. Hal ini mencerminkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem pendidikan agar dapat memenuhi standar yang diharapkan dan memberikan hasil yang lebih baik bagi anak-anak kita.

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pengelolaan serta pengembangan sistem pendidikan yang ada di seluruh tanah air. Tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah tidak hanya terbatas pada perumusan kebijakan pendidikan, tetapi juga mencakup aspek pendanaan yang sangat vital untuk kelangsungan dan kemajuan Pendidikan [14]. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, terlihat bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun, meskipun terdapat peningkatan tersebut, angka alokasi anggaran yang ada masih jauh dari angka ideal jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan pendanaan pendidikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi agar pendidikan di Indonesia bisa setara dengan standar yang diterapkan di negara-negara tetangga (Kemenkeu, 2021).

Dalam konteks pendidikan, baik lembaga yang beroperasi secara formal maupun yang bersifat non-formal memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis [15]. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal, dituntut untuk dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi, termasuk dalam hal kurikulum dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Namun, meskipun demikian, masih banyak sekolah yang belum sepenuhnya siap untuk mengimplementasikan kurikulum baru yang telah ditetapkan [16]. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat untuk menjalin kerjasama yang baik dan efektif demi mencapai tujuan pendidikan yang optimal [17] [18].

B. Tantangan dalam Sistem Pendidikan Nasional

Ada perbedaan yang signifikan dalam kualitas Pendidikan dan akses antara kota dan pedesaan, yang merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi sistem pendidikan nasional [6]. Berdasarkan data yang dirilis oleh UNICEF (2020), anak-anak yang tinggal di daerah terpencil memiliki akses yang jauh lebih terbatas terhadap pendidikan berkualitas dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan. Sebagai contoh menurut penelitian Vika tahun 2022, tingkat partisipasi sekolah usia 7-24 tahun di Papua masih tergolong rendah yakni sekitar 60,68%. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang nyata dalam kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah.

Kualitas pendidikan juga menjadi isu yang sangat penting. Hasil survei PISA (*Programme for International Student Assessment*) menunjukkan bahwa siswa Indonesia masih berada di peringkat yang rendah dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan sains jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia

(OECD, 2019). Kesenjangan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor geografis, tetapi juga oleh faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kapasitas orang tua untuk memberikan dukungan akademis kepada anak-anak mereka [19].

Kurikulum saat ini sering dianggap tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah dan kemajuan teknologi yang cepat. Banyak lulusan sekolah yang tidak memiliki ketrampilan praktis yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja [20]. Menurut laporan dari World Economic Forum (2020), diperkirakan sekitar 85 juta pekerjaan mungkin akan hilang akibat otomatisasi dan perubahan teknologi, sementara 97 juta pekerjaan baru diperkirakan akan muncul. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penyesuaian kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Salah satu ilustrasi nyata yang mencerminkan permasalahan ini adalah program pendidikan vokasi yang ada di Indonesia, yang saat ini masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di tanah air, kenyataannya masih terdapat banyak sekolah kejuruan yang cenderung lebih fokus pada pengajaran teori dan kurang memberikan pengalaman praktis yang memadai bagi para siswa [21]. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang cukup signifikan bagi para lulusan, terutama dalam menghadapi persaingan di pasar kerja yang semakin ketat dan kompetitif. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa pendidikan vokasi tidak hanya mengajarkan pengetahuan teoritis, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan praktis yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Kompetensi guru merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Namun demikian, banyak guru yang belum memiliki keahlian/ kompetensi yang diperlukan sesuai dengan standar yang ditetapkan [22]. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa sekitar 60% guru di Indonesia belum memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan (Kemendikbud, 2021). Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap kualitas pengajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Selain itu, terdapat kekurangan yang signifikan dalam hal pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru. Banyak dari mereka tidak mendapatkan kesempatan yang memadai untuk mengikuti program pelatihan yang berkualitas dan terstruktur, yang mengakibatkan kesulitan dalam memperbarui serta meningkatkan metode pengajaran yang mereka terapkan di kelas [23]. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas para guru melalui implementasi program pelatihan yang berkelanjutan. Langkah ini dianggap sebagai suatu keharusan saat ini untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi siswa dan sistem pendidikan yang lebih luas [24]. Pelatihan yang berkelanjutan tidak hanya akan membantu guru dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka, tetapi juga akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan belajar yang lebih efektif dan inovatif.

Infrastruktur atau sarana pendidikan yang memadai merupakan salah satu faktor kunci yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan efektif. Namun, kenyataannya di banyak daerah, khususnya di wilayah-wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau,

fasilitas pendidikan yang ada masih tergolong sangat minim dan tidak memadai [25]. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), terungkap bahwa sekitar 30% sekolah yang ada di Indonesia tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan yang memadai, serta akses internet yang baik dan stabil. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam penyediaan sarana pendidikan yang seharusnya dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal.

Kondisi yang ada saat ini mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan tidak optimal. Siswa yang tinggal di daerah-daerah terpencil sering kali dihadapkan pada tantangan untuk menempuh jarak yang cukup jauh demi mencapai sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas yang lebih memadai. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap minat dan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar [25]. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menjadikan investasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam program kebijakan mereka. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan akses yang lebih baik bagi semua siswa, tanpa terkecuali, sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan setara.

Di zaman digital yang terus berkembang pesat saat ini, peran teknologi dalam bidang pendidikan menjadi semakin krusial dan tidak dapat diabaikan [26]. Meskipun demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua lembaga pendidikan di Indonesia telah siap untuk mengadopsi dan menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran mereka. Berdasarkan hasil survei yang

dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), tercatat bahwa sekitar 40% dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia masih belum memiliki akses internet yang memadai. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala utama dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran daring yang semakin dibutuhkan di era modern ini (APPI, 2021).

Pandemi COVID-19 telah menjadi pendorong yang signifikan bagi percepatan adopsi teknologi dalam dunia pendidikan, di mana banyak institusi pendidikan, terutama sekolah-sekolah, beralih dari metode pembelajaran tradisional ke pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online [27]. Meskipun perubahan ini menawarkan berbagai kemudahan dan fleksibilitas, situasi ini juga mengungkapkan adanya kesenjangan digital yang cukup mencolok. Kesenjangan ini terlihat jelas pada siswa-siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, di mana mereka sering kali tidak memiliki akses terhadap perangkat teknologi yang memadai untuk mengikuti proses pembelajaran daring secara efektif (Kemenkominfo, 2020). Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan merata. Hal ini bertujuan agar semua siswa, tanpa terkecuali, dapat menikmati dan merasakan manfaat dari kemajuan teknologi dalam pendidikan, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam proses pembelajaran yang semakin modern ini [28].

C. Arah Pengembangan dan solusi

Reformasi kurikulum yang berlandaskan pada kompetensi abad ke-21 memiliki peranan yang sangat krusial dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini. Kurikulum ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan

penguasaan pengetahuan di kalangan peserta didik, tetapi juga harus berfokus pada pengembangan keterampilan yang sangat diperlukan, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi [29]. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat dunia kerja saat ini semakin kompleks dan dinamis, yang mengharuskan individu untuk memiliki berbagai keterampilan tambahan selain pengetahuan akademis. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk merancang kurikulum yang mampu menjawab tuntutan tersebut, sehingga lulusan yang dihasilkan dapat bersaing dan beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja yang terus berubah [30].

Penerapan kurikulum yang berfokus pada pengembangan kompetensi memerlukan adanya pelatihan yang memadai bagi para pendidik. Hal ini bertujuan agar para guru dapat melaksanakan kurikulum tersebut secara efektif dan efisien di dalam lingkungan kelas [31]. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan sektor industri tidak bisa diabaikan, karena kerjasama ini berperan krusial dalam memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan pasar kerja saat ini (World Economic Forum, 2020). Dengan demikian, pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi tidak hanya bergantung pada metode pengajaran yang baik, tetapi juga pada dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan dan industri.

Penguatan peran yang dimiliki oleh para guru sangatlah krusial dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut, sangat penting untuk menyediakan program pelatihan yang bersifat berkelanjutan, yang dirancang khusus untuk membantu para guru dalam mengembangkan berbagai

kompetensi yang mereka miliki [31]. Selain itu, aspek peningkatan kesejahteraan para guru juga merupakan faktor yang tidak kalah penting, karena hal ini dapat berfungsi sebagai motivasi bagi mereka untuk memberikan yang terbaik dalam proses pengajaran yang mereka lakukan. Dengan demikian, perhatian yang lebih besar terhadap kedua aspek ini—pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan peningkatan kesejahteraan—dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh para siswa [32].

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan insentif yang memadai bagi para guru, khususnya mereka yang mengajar di wilayah-wilayah terpencil. Tujuan dari pemberian insentif ini adalah untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar yang berkualitas dan kompeten. Dengan adanya insentif yang menarik, diharapkan para guru akan lebih termotivasi untuk mengajar di daerah-daerah yang kurang terlayani. Pada akhirnya, langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah tersebut, sehingga kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat diminimalkan. Dengan demikian, setiap anak di Indonesia, tanpa memandang lokasi geografisnya, dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan merata [33] [34]

Penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan seharusnya diterapkan dengan pendekatan yang bersifat inklusif serta merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap sekolah, terutama yang terletak di daerah-daerah yang terpencil dan kurang terjangkau, mendapatkan akses yang cukup dan memadai terhadap

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Oleh karena itu, program-program yang berfokus pada penyediaan perangkat belajar yang diperlukan serta peningkatan infrastruktur internet harus dijadikan sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan pendidikan nasional (Kemenkominfo, 2020). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan setiap siswa, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi dalam proses belajar mengajar.

Pelatihan yang ditujukan untuk para guru serta siswa dalam pemanfaatan teknologi memiliki peranan yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan, dengan adanya pelatihan tersebut, teknologi dapat dimanfaatkan dengan cara yang lebih efektif dalam konteks proses pembelajaran. Dengan penggunaan teknologi yang tepat dan efisien, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik (APPI, 2021).

Pendidikan yang berorientasi pada proyek dapat menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan keterkaitan antara proses pembelajaran dan tuntutan yang ada di dunia nyata. Dengan menerapkan metode ini, para siswa tidak hanya akan mendapatkan teori yang bersifat abstrak, tetapi juga akan memperoleh pengetahuan praktis yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pengalaman langsung yang diperoleh melalui kegiatan proyek memungkinkan siswa untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari, sehingga memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan situasi nyata dan mengembangkan keterampilan yang relevan. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar

siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan berbasis proyek dapat dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dunia akademis dengan dunia profesional, memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini [35]

Keterampilan hidup yang esensial, termasuk kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, serta berpikir secara kritis, seharusnya mulai diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Dengan pendekatan ini, para siswa tidak hanya akan dipersiapkan untuk menghadapi berbagai ujian akademis yang mereka hadapi di sekolah, tetapi juga akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan mereka temui dalam kehidupan nyata di masyarakat. Hal ini penting agar mereka dapat beradaptasi dan berkontribusi secara positif di lingkungan sosial dan profesional mereka di masa depan [36].

Sinergi yang harmonis dan efektif antara pihak pemerintah, institusi pendidikan seperti sekolah, serta masyarakat luas memiliki peranan yang sangat krusial dalam upaya menciptakan sebuah sistem pendidikan yang berkualitas tinggi. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa agar kebijakan pendidikan yang diterapkan dapat berjalan dengan lebih efektif dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mendorong dan mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan,

diharapkan akan tercipta keselarasan antara apa yang dirumuskan oleh pemerintah dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri tetapi juga akan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang ada [37].

Untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan sesuai dengan permintaan pasar, kerjasama antara sekolah dan sektor industri juga perlu ditingkatkan [38]. Dengan Kerjasama ini, Pendidikan Indonesia diharapkan menjadi lebih baik dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Untuk menjamin bahwa kurikulum yang diterapkan dalam proses pembelajaran selaras dengan kebutuhan yang ada di pasar, sangat penting untuk meningkatkan kolaborasi antara institusi pendidikan dan sektor industri. Melalui kerjasama yang erat ini, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga para lulusan akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan [38]. Dengan demikian, sinergi antara dunia pendidikan dan industri akan menciptakan peluang yang lebih baik bagi siswa dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial di negara ini.

Saat ini, sistem pendidikan nasional di Indonesia menghadapi serangkaian tantangan yang sangat kompleks dan beragam. Berbagai isu yang muncul, mulai dari kesenjangan dalam akses pendidikan, kualitas pengajaran yang masih perlu ditingkatkan, hingga relevansi kurikulum yang tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar kerja, menjadi hambatan signifikan dalam upaya

menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, tingkat partisipasi kasar dalam pendidikan dasar tercatat masih cukup tinggi, yaitu sebesar 97,6%. Namun, angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tingkat pendidikan menengah, di mana hanya mencapai 75,9% (BPS, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap pendidikan dasar telah mencapai taraf yang memadai, masih banyak anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan di Indonesia masih berkualitas rendah dengan hasil ujian internasional seperti PISA yang menunjukkan bahwa siswa Indonesia berada di peringkat yang kurang memuaskan dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan sains [39].

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, diperlukan solusi inovatif yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan teknologi dalam proses pembelajaran, yang diharapkan dapat menjangkau siswa yang berada di daerah terpencil. Inisiatif seperti program "Sekolah Digital" yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang luas melalui platform online. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan teknologi ini harus diimbangi dengan pelatihan yang memadai bagi para guru, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif dalam proses belajar mengajar.

Dalam rangka untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis pada riset yang

komprehensif. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus didasarkan pada data dan analisis yang mendalam agar dapat menjawab kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) menunjukkan bahwa pelatihan guru yang berkelanjutan dan berbasis kompetensi dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pengajaran serta hasil belajar siswa (LPMP, 2022). Oleh karena itu, pemerintah perlu harus menyediakan penganggaran yang memadai untuk penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan.

Kolaborasi antara pemerintah, kalangan akademisi, dan praktisi pendidikan juga sangat penting dalam pengembangan sistem pendidikan nasional yang lebih baik. Melalui kerja sama ini, berbagai pihak dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta menciptakan program-program yang lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, program "Guru Penggerak" yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan guru-guru inovatif dari berbagai daerah untuk berbagi praktik baik dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing (Kemendikbud, 2021).

Selain itu, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pendidikan juga merupakan langkah yang sangat krusial. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung pendidikan melalui berbagai cara, seperti menjadi relawan di sekolah, menyumbangkan sumber daya, atau bahkan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan di lingkungan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam pendidikan dapat secara signifikan meningkatkan motivasi

dan prestasi siswa. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan masyarakat ruang dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan pendidikan.

Dengan mengintegrasikan berbagai solusi dan rekomendasi yang telah disebutkan di atas, diharapkan sistem pendidikan nasional dapat bertransformasi menjadi lebih baik, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Pendidikan yang berkualitas bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh elemen masyarakat. Melalui kolaborasi yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

D. Daftar Pustaka

- [1] L. D. Sanga and Y. Wangdra, "8067-Article Text-30786-2-10-20231011," no. Pendidikan Adalah Faktor Penentu Daya Saing Bangsa, Sep. 2023.
- [2] H. A. Irianto, *Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa*. Kencana, 2017.
- [3] A. Widiensyah, "Peran ekonomi dalam pendidikan dan pendidikan dalam pembangunan ekonomi," *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, vol. 17, no. 2, pp. 207–215, 2017.
- [4] W. Sihab and M. Achmad, "Relevansi Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia," *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 3, no. 1, pp. 237–249, 2025.
- [5] A. Tinus and R. T. Wulandari, "The reinforcement of the school culture-based character education," *Italian*

- Journal of Sociology of Education*, vol. 13, no. Italian Journal of Sociology of Education 13/2, pp. 195–218, 2021.
- [6] K. Fadil, A. Amran, and N. I. Alfaien, “Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Mewujudkan Sustainable Developments Goal’s,” *Attadib: Journal of Elementary Education*, vol. 7, no. 2, 2023.
 - [7] T. Sukomardojo, “Mewujudkan pendidikan untuk semua: Studi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia,” *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah Volume*, vol. 5, no. 2, pp. 205–214, 2023.
 - [8] N. H. Ismatullah, “Tantangan dan Peluang dalam Perencanaan Pendidikan Berkelanjutan di Era Globalisasi,” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, vol. 35, no. 01, pp. 61–73, 2025.
 - [9] A. Fukaro, “Pengaruh Latar Belakang Sosial terhadap Kesempatan Pendidikan,” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 7, no. 2, pp. 1214–1220, 2025.
 - [10] M. S. Iswahyudi *et al.*, *Kebijakan dan inovasi pendidikan: Arah pendidikan di masa depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
 - [11] H. S. Sagala and S. Sos, *Memahami organisasi pendidikan: Budaya dan reinventing, organisasi pendidikan*. Prenada Media, 2016.
 - [12] K. P. D. Kebudayaan, “Dokumen kurikulum 2013,” *Jakarta: Kemendikbud*, 2012.
 - [13] J. W. Kusuma, H. Hamidah, U. Umalihayati, and P. P. Rini, “Mengurai benang kusut kebijakan pendidikan Indonesia: Sebuah literature review analitik,” *Jurnal*

- Ilmiah Global Education*, vol. 5, no. 2, pp. 1810–1826, 2024.
- [14] E. Nasution, “Problematika pendidikan di Indonesia,” *Jurnal Mediasi*, vol. 8, no. 1, 2014.
- [15] R. Ahmadi and J. M. Haryono, “Mengintegrasikan Layanan Pendidikan Nonformal Dan Pendidikan Formal Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah,” *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, vol. 32, no. 1, pp. 22–29, 2015.
- [16] M. Maskur, “Dampak pergantian kurikulum pendidikan terhadap peserta didik sekolah dasar,” *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (JKIP)*, vol. 1, no. 3, pp. 190–203, 2023.
- [17] N. Kurniati, S. Halidjah, and A. T. Priyadi, “Peran Orang Tua dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri 17 Kabupaten Sintang,” *JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia)*, vol. 8, no. 3, pp. 112–117, 2023.
- [18] N. Normina, “Partisipasi masyarakat dalam pendidikan,” *Ittihad*, vol. 14, no. 26, 2016.
- [19] S. A. Rahma, A. P. P. Ikhsan, and D. Yemima, “Dampak pengabaian orang tua terhadap regulasi emosi anak,” *Jurnal Psikologi*, vol. 1, no. 4, p. 18, 2024.
- [20] R. A. Susianita and L. P. Riani, “Pendidikan sebagai kunci utama dalam mempersiapkan generasi muda ke dunia kerja di era globalisasi,” *Prosiding Pendidikan Ekonomi*, pp. 1–12, 2024.
- [21] A. D. Widiatna, *Teaching factory: arah baru manajemen sekolah menengah kejuruan di Indonesia*. Pustaka Kaji, 2019.

- [22] H. Jamin, "Upaya meningkatkan kompetensi profesional guru," *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, pp. 19–36, 2018.
- [23] Y. G. Mia and S. Sulastri, "Analisis Kompetensi Profesional Guru," *Journal of Practice Learning and Educational Development*, vol. 3, no. 1, pp. 49–55, 2023.
- [24] H. E. Mulyasa, *Menjadi guru penggerak merdeka belajar*. Bumi Aksara, 2021.
- [25] N. S. Perdana, "Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan untuk anak-anak di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 21, no. 3, pp. 279–298, 2015.
- [26] S. Said, "Peran teknologi digital sebagai media pembelajaran di era abad 21," *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, vol. 6, no. 2, pp. 194–202, 2023.
- [27] M. Hendriyani, N. M. Artini, and T. Tatyana, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Dunia Pendidikan," *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, vol. 10, no. 2, pp. 13–21, 2021.
- [28] S. Marselina, G. Prananda, L. Judijanto, M. A. Fatulloh, D. Rimbano, and M. S. Fauzi, "Hopes and Challenges: The Analysis of The Role of Technology in Implementing Social Justice in Education for Indonesia's Golden Generation in 2045," *TOFEDU: The Future of Education Journal*, vol. 3, no. 4, pp. 823–831, 2024.
- [29] A. R. Hakim, "Konsep landasan dasar pendidikan karakter di Indonesia," *Journal on Education*, vol. 6, no. 1, pp. 2361–2373, 2023.
- [30] B. Arifin and A. Mu'id, "Pengembangan kurikulum berbasis keterampilan dalam menghadapi tuntutan kompetensi abad 21," *DAARUS TSAQOFAH Jurnal*

- Pendidikan Pascasarjana Universitas Qomaruddin*, vol. 1, no. 2, pp. 118–128, 2024.
- [31] T. Pawartani and O. A. Suciptaningsih, “Pengembangan kompetensi guru untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka,” *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 7, no. 3, pp. 2182–2191, 2024.
- [32] M. I. Sholeh, “Pengakuan dan reward dalam manajemen sdm untuk meningkatkan motivasi guru,” *COMPETITIVE: Journal of Education*, vol. 2, no. 4, pp. 212–234, 2023.
- [33] D. Satria, I. H. Kusasih, and G. Gusmaneli, “Analisis Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia Saat Ini: Suatu Kajian Literatur,” *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, vol. 3, no. 2, pp. 292–309, 2025.
- [34] R. A. Susianita and L. P. Riani, “Pendidikan sebagai kunci utama dalam mempersiapkan generasi muda ke dunia kerja di era globalisasi,” *Prosiding Pendidikan Ekonomi*, pp. 1–12, 2024.
- [35] I. Kamaruddin, E. Suarni, S. Rambe, B. P. S. Sakti, R. S. Rachman, and P. Kurniadi, “Penerapan model pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan: Tinjauan literatur,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, vol. 6, no. 4, pp. 2742–2747, 2023.
- [36] R. H. Mardhiyah, S. N. F. Aldriani, F. Chitta, and M. R. Zulfikar, “Pentingnya keterampilan belajar di abad 21 sebagai tuntutan dalam pengembangan sumber daya manusia,” *Lectura: Jurnal Pendidikan*, vol. 12, no. 1, pp. 29–40, 2021.
- [37] F. Suryadi, M. H. Pasaribu, A. D. Siahaan, A. Sabri, and Y. Lubis, “Peran manajemen pendidikan dalam mewujudkan sekolah berkualitas,” *Inspirasi Dunia:*

Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa, vol. 3, no. 4, pp. 92-107, 2024.

- [38] E. Suwandono, "Analisis Kompetensi Siswa dan Tingkat Serapan Lulusan Pada Penerapan Kurikulum Merdeka," no. Analisis Kompetensi Siswa dan Tingkat Serapan Lulusan Pada Penerapan Kurikulum Merdeka, pp. 1-1, Dec. 2024.
- [39] A. Tjalla, "Potret mutu pendidikan indonesia ditinjau dari hasil-hasil studi internasional," 2010.

FUNGSI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Pendidikan adalah sebuah proses humanime yang kemudian dikenal sebagai “memanusiakan manusia” [1]. Pendidikan adalah upaya nyata untuk membantu setiap orang menjadi lebih mandiri dan lebih matang secara mental, sehingga mereka dapat bertahan hidup di dunia yang bertentangan [2]. Manusia telah menyadari bahwa pendidikan merupakan sarana utama dalam menyebarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi berikutnya [3]. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berpikir dan bertindak secara efektif, tetapi juga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang beradab, berdaya saing, dan berkelanjutan [4]. Pendidikan didefinisikan sebagai proses sistematis yang dirancang untuk mengembangkan kapasitas kognitif, afektif, dan psikomotor individu dalam konteks sosial dan budaya [5]. Secara kognitif, pendidikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis dan kreatif. Melalui proses pembelajaran, individu memperoleh pengetahuan untuk memahami dunia secara lebih baik, memecahkan masalah dan menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas [6]. Proses kognitif dalam pendidikan juga diperkaya oleh interaksi sosial yang membantu seseorang dalam memahami perspektif yang berbeda dan mengembangkan cara berpikir yang lebih komprehensif [7].

Selain aspek kognitif, pendidikan juga mengembangkan aspek afektif, yaitu aspek emosional dan nilai-nilai yang membentuk kepribadian serta moral seseorang [8]. Pendidikan menanamkan nilai-nilai etika,

empati, tanggung jawab, dan sikap toleransi yang menjadi dasar dalam interaksi sosial [9]. Dengan adanya pendidikan yang menekankan aspek afektif, individu tidak hanya menjadi cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan berbagai tantangan kehidupan. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam pengembangan aspek psikomotor individu yang berkaitan dengan keterampilan fisik dan koordinasi motorik [10]. Pengembangan psikomotor juga memiliki hubungan erat dengan kesehatan fisik dan mental untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, terutama di era globalisasi yang semakin kompetitif [11]. Pendidikan berfungsi sebagai sarana utama dalam membekali individu kompetensi akademik, keterampilan teknis, serta kemampuan berpikir kritis dan inovatif [12]. Pendidikan juga membantu individu dalam memahami dan menghargai keberagaman budaya, sehingga mencegah terjadinya konflik sosial yang bersumber dari perbedaan budaya dan ideologi [13]. Selain sebagai alat peningkatan daya saing, pendidikan juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam transfer nilai-nilai normatif dan budaya [14]. Pendidikan menanamkan prinsip-prinsip filosofis dan budaya bangsa secara keseluruhan. Dalam hal ini, pendidikan memainkan fungsi yang sangat penting dalam memastikan bahwa norma-norma fundamental, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama tetap tertanam dalam setiap individu.

Pendidikan berfungsi sebagai mekanisme utama dalam mobilitas sosial dan ekonomi [15]. Sebagai bentuk

usaha pembaruan bangsa perlu dilanjutkan di segala bidang kehidupan yaitu ekonomi dan sosial budaya [16]. Melalui pendidikan juga seseorang dapat memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidupnya [17]. Mobilitas sosial yang tinggi juga berdampak pada berkurangnya kesenjangan sosial dalam masyarakat, karena setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan berdasarkan kemampuannya bukan hanya karena faktor keturunan atau status sosial [18]. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berdampak pada individu secara personal tetapi juga berfungsi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari sistem sosial lembaga pendidikan berfungsi sebagai sarana utama dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan [19]. Pendidikan yang diberikan oleh lembaga formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, serta lembaga nonformal seperti kursus dan pelatihan keterampilan memiliki tujuan untuk menciptakan individu yang kompeten dan berdaya saing tinggi [20]. Adanya lembaga pendidikan, masyarakat dapat mengurangi kesenjangan sosial karena setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Di era digitalisasi dan revolusi industri 4.0, lembaga pendidikan dituntut untuk bertransformasi guna menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri yang terus berkembang [21]. Dengan demikian, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang

tinggi dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan dunia [22].

A. Dimensi Fungsional Pendidikan

Pendidikan memiliki dimensi fungsional yang mencakup fungsi manifes dan fungsi laten, keduanya berperan dalam membentuk individu dan masyarakat.

Fungsi Manifes

Fungsi manifes dalam pendidikan merujuk pada tujuan-tujuan eksplisit, formal, dan terukur yang dirancang secara sadar oleh sistem pendidikan. Fungsi ini mencerminkan harapan langsung yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran, naik dari sudut pandang individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Fungsi manifes ini mencakup beberapa fungsi utama yaitu:

Pertama, *Transmisi Pengetahuan dan Keterampilan*. Pendidikan memiliki fungsi sebagai sarana dalam mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan. Segala aktivitas dalam dunia pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan manusia, maka keberhasilan pendidikan bergantung kepada unsur manusianya karena manusia menentukan berhasil atau tidaknya [3]. Dalam proses tersebut tidak sekadar hanya mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga mendewasakan manusia secara menyeluruh dalam nilai, etika, dan moral [23]. Dengan demikian pendidikan dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh pengetahuan yang relevan dan keterampilan yang aplikatif, tidak hanya menekankan pada aspek teoritis tetapi memberikan pengalaman praktis dan mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata [5] [24].

Melalui pendidikan, setiap individu diberikan bekal pengetahuan secara teoretis dan keterampilan praktis yang memungkinkan mereka untuk bisa beradaptasi, berinovasi dan berani untuk mengambil peran aktif dalam masyarakat. Proses transmisi ini berlangsung secara sistematis dan terstruktur untuk membantu memfokuskan pada yang dirancang untuk membentuk kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik [25]. Dalam konteks sekolah, proses transmisi tersebut bergantung pada kualitas interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan menciptakan ruang dialogis dan partisipatif yang kondusif, sehingga tumbuhnya rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan kemampuan reflektif pada diri peserta didik [26]. Dengan demikian, para peserta didik tidak hanya sebagai objek penerima pengetahuan dari pendidik, tetapi juga menjadi pengelola dan pengembang ilmu serta keterampilan yang relevan dengan tantangan zaman saat ini.

Kedua, *Pembentukan Identitas Sosial dan Karakter*. Pendidikan selain berfungsi sebagai media transmisi pengetahuan, lebih dari itu pendidikan memiliki fungsi yang fundamental untuk membentuk identitas sosial dan karakter individu [7]. Pada fungsi ini menekankan bahwa bagaimana pun peserta didik bukanlah robot yang dapat dimanipulasi, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki kesadaran dalam diri peserta didik, serta adanya sebuah potensi untuk berkembang. Demikian, proses perjalanan pendidikan perlu dirancang kembali untuk membimbing peserta didik dalam memahami diri mereka diri sendiri, mampu untuk menanggapi adanya perubahan sosial secara kritis dan membentuk sikap moral yang tangguh.

Dalam hal ini pendidikan diharapkan dapat mengembangkan etika, rasa tanggung jawab sosial, serta

kecerdasan yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik agar terciptanya sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten tetapi juga integritas, empati dan beradaptasi [27]. Pendidikan yang terintegrasi dengan karakter, peserta didik diarahkan untuk menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kesadaran sebagai warga negara, identitas sosial, moralitas etika yang baik terhadap lingkungannya [25], [28]. Oleh karena itu, pendidikan disini tidak boleh semata-mata berorientasi hanya pada hasil kognitif, tetapi juga harus menjadi sebuah proses humanisasi yang menjadikan peserta didik sebagai manusia seutuhnya-berakal budi, berperasaan dan bermoral.

Ketiga, *Sosialisasi Budaya dan Ideologi*. Pendidikan menunjukkan adanya peningkatan kualitas kemasyarakatan dalam berbagai rangkaian ideologi, kebudayaan dan perekonomian [1]. Melalui pendidikan juga nilai-nilai sosial, budaya, dan ideologi yang berlaku di suatu masyarakat dapat diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya yang merujuk pada budaya internalisasikan ke dalam diri setiap individu sejak dini dan sepanjang hidup [29]. Sosialisasi tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek kognitifnya saja, tetapi juga mencakup adanya pembelajaran nilai-nilai, norma-norma sosial, serta pola hidup yang mendukung keberlanjutan struktur sosial yang sudah ada.

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi sarana yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan ideologi yang membentuk karakter bangsa. Melalui mata pelajaran yang ada di sekolah, peserta didik dikenalkan pada identitas nasional norma sosial, konsep demokrasi, hak asasi manusia dan keberagaman budaya guna menumbuhkan sikap toleransi dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat

[30]. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkokoh serta menjaga kontinuitas budaya serta memperkuat rasa nasionalisme dan kebangsaan dalam diri setiap individu.

Keempat, *Persiapan Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing*. Berbagai inisiatif telah dirancang dengan tujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di era modern dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, inklusif, dan berkualitas [4]. Pendidikan dalam humanisme berfungsi menyokong manusia untuk meningkatkan potensi-potensi kemanusiannya karena pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk belajar dan meningkatkan potensi kecerdasannya [1]. Dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pendidikan memainkan fungsi strategisnya dalam menyiapkan sumber daya manusianya yang kompeten, adaptif, dan siap untuk bersaing di dunia kerja. Dalam hal ini, fokus pendidikan tidak lagi terbatas hanya pada penguasaan ilmu pengetahuan secara teoritis saja, tetapi juga mencakup lebih luas pada penguatan keterampilan praktis.

Kurikulum pendidikan yang berbasis keterampilan dan kompetensi dirancang agar lulusan memiliki daya saing tinggi di pasar kerja. Misalnya, di tingkat SMK dan perguruan tinggi vokasi, siswa dilatih dengan keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri, seperti digitalisasi, kewirausahaan, dan keterampilan berbasis teknologi [31]. Oleh karena itu, pendidikan mampu untuk memfasilitasi proses transformasi diri, di mana manusia tidak hanya diasah dari segi intelektualnya, tetapi juga diperdayakan untuk mendorong menjadi individu pembelajar sepanjang hayat.

Dengan demikian, pendidikan mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis, kepribadian tangguh dan kemampuan adaptif dalam menghadapi tantangan nasional maupun global [32].

Fungsi Laten

Fungsi laten dalam pendidikan dapat dipahami sebagai dimensi secara implisit dari proses pembelajaran yang tidak selalu tertuang secara eksplisit baik dalam kurikulum maupun kebijakan formal yang ada, tetapi tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan individu dan struktur sosial. Fungsi laten ini mencakup beberapa fungsi utama yaitu:

Pertama, *Pemeliharaan Stratifikasi Sosial*. Pendidikan menjalankan fungsi penting dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial masyarakat dapat dilihat melalui mekanisme dan klasifikasi yang diterapkan dalam sistem pendidikan formal. Masyarakat yang dihasilkan dari sistem pendidikan yang memiliki fondasi kuat dalam nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan akan mendorong untuk terciptanya lingkungan dimana semua individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang [4]. Di sisi lain, peserta didik dari kelompok marginal sering kali dihadapkan dengan berbagai hambatan struktural seperti adanya keterbatasan ekonomi, akses pendidikan yang tidak merata, serta kurangnya dukungan sosial. Dengan demikian alih-alih menjadi alat pemerataan, pendidikan justru menjalankan fungsinya sebagai mekanisme laten yang mempertahankan struktur sosial yang tidak setara.

Namun demikian, potensi pendidikan untuk mengikis stratifikasi tetap terlihat. Pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan dengan nilai-nilai humanistik yang

mengedepankan adanya kebebasan dan kesetaraan, maka pendidikan bisa menjadi kekuatan transformasi yang nyata [33]. Dengan berkontribusi untuk membentuk sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam pembangunan sosial-ekonomi nasional, pendidikan dapat membantu untuk mengurangi ketimpangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting dalam upaya memerangi kebodohan memerangi kemiskinan, meningkatkan kualitas taraf hidup setiap orang, dan membangun harkat negara dan bangsa [1].

Kedua, *Peningkatan Kohesi Sosial*. Pendidikan memainkan fungsi laten yang cukup signifikan dalam memperkuat integrasi sosial di tengah keberagaman masyarakat. Kohesi sosial merujuk pada tingkat keterikatan dan solidaritas antar anggota masyarakat dari berbagai nilai, norma serta adanya tujuan bersama yang mempererat hubungan sosial dan mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis [34]. Pendidikan juga menyediakan ruang bagi interaksi sosial antarkelompok yang berbeda-baik dari segi agama, budaya, kelas sosial, maupun latar belakang ekonomi sehingga interaksi tersebut dalam mengurangi stereotip yang memicu timbulnya konflik horizontal.

Dengan demikian, fungsi laten pendidikan dalam memperkuat kohesi sosial tidak boleh diabaikan, penting bagi sistem pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keberagaman dalam praktik pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan menjadi sarana yang efektif dalam menjalankan fungsi dalam membangun dan memperkuat kohesi sosial dengan menciptakan kesadaran kolektif, menanamkan nilai-nilai kebersamaan, serta membentuk sikap toleransi di antara individu dari berbagai latar belakang [35].

Ketiga, *Reduksi Perilaku Menyimpang*. Pendidikan memiliki fungsi laten dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis dengan menanamkan nilai-nilai moral, etika dan prinsip hidup guna mereduksi perilaku menyimpang, terutama di kalangan generasi muda [15]. Perilaku menyimpang (*deviant behavior*) merupakan tindakan individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma sosial, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat [36]. Sebagai proses sosial yang berlangsung sepanjang hayat, pendidikan menjalankan fungsinya dalam mengurangi tingkat perilaku menyimpang dengan membentuk kontrol sosial, internalisasi nilai-nilai moral, serta memberikan peluang bagi individu untuk mengembangkan diri secara positif [35].

Kesadaran diri, tanggung jawab dan juga kontrol terhadap tindakan mereka menjadikan pendidikan menjalankan fungsinya dalam perubahan yang baik pada proses bermasyarakat. Disinilah program pendidikan karakter menjadi instrument utama dalam upaya pencegahan perilaku menyimpang dengan penyuluhan mengenai bahaya narkoba, pergaulan bebas, serta tindakan kriminal di sekolah merupakan contoh konkret bagaimana pendidikan berupaya mencegah perilaku menyimpang sejak dini [37].

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian intelektual tetapi juga sebagai pemberi arah dan makna dalam kehidupan individu, pemahaman nilai serta sikap yang tepat dan sarana pencegahan sosial yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih tertib, aman dan beradab [38].

B. Tipologi Lembaga Pendidikan

Dalam praktiknya, pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di berbagai lembaga yang memiliki fungsi dan pendekatan yang beragam. Setiap lembaga pendidikan dibentuk untuk menjawab dari kebutuhan masyarakat, mulai dari pembelajaran akademik, keterampilan kerja, hingga penguatan nilai sosial dan budaya. Tipologi ini mengelompokan lembaga berdasarkan jenis, fungsi dan bentuk penyelenggaraan pendidikannya, sebagai berikut:

Lembaga Pendidikan Formal

Lembaga pendidikan formal adalah institusi pendidikan yang memiliki struktur sistematis, terorganisir dan dijalankan dengan resmi oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta dengan pengakuan negara [39]. Lembaga ini menyelenggarakan proses pembelajaran secara berjenjang dan bertahap, yang mencakup pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi [40]. Dengan ciri khas dari pendidikan formal adalah adanya kurikulum nasional yang berlaku, jadwal belajar yang tetap, tenaga kependidikan, serta sistem evaluasi yang terstandar secara nasional maupun internasional.

Pendidikan formal dirancang untuk mencapai tujuan secara menyeluruh, baik dalam aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) maupun psikomotorik (keterampilan) [41]. Selain itu, pendidikan formal juga bertujuan mencetak lulusan yang memiliki kualifikasi akademik atau vokasional yang dapat digunakan sebagai dasar untuk peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mempersiapkan memasuki dunia kerja.

Adapun fungsi dari lembaga pendidikan formal, yaitu menjalankan fungsinya dalam akademik dan intelektual –

mengembangkan kapasitas berpikir kritis, logis dan ilmiah melalui mata pelajaran umum maupun kejuruan; menjalankan fungsinya dalam sosial dan struktural – lembaga menjadi wadah adanya interaksi antarindividu dari latar belakang yang beragam, serta sarana pewarisan nilai, budaya, dan identitas nasional; menjalankan fungsinya dalam ekonomi – untuk mempersiapkan individu agar siap ke dalam dunia kerja dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan menjalankan fungsinya dalam transformasional – membentuk manusia pembelajar sepanjang hayat yang siap beradaptasi dengan perubahan zaman, baik dalam konteks sosial, teknologi, maupun ekonomi [42].

Secara keseluruhan, lembaga pendidikan formal memegang peran sentral dalam pendidikan nasional karena menjadi salah satu wadah dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul secara intelektual, terampil secara praktis, dan kuat dalam karakter. Selain itu, pendidikan formal menjadi landasan yang kuat untuk pembangunan bangsa, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun politik dengan struktur yang sistematis dan kurikulum disesuaikan dengan tetap memperhatikan perkembangan sikap, nilai, keterampilan hidup yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21 [43].

Lembaga Pendidikan Nonformal

Lembaga pendidikan nonformal merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal, namun tetap memiliki tujuan yang jelas dan struktur pembelajaran yang fleksibilitas dalam pelaksanaannya [44]. Pendidikan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu yang tidak mendapatkan akses pendidikan formal secara penuh maupun yang ingin memperoleh keterampilan

dan pengetahuan tambahan di luar lingkungan sekolah atau universitas [45]. Pendidikan nonformal mencakup semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur, tetapi tidak memiliki jenjang berkelanjutan seperti pendidikan formal [40].

Pendidikan nonformal mencakup berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Beberapa bentuk penyelenggaraannya sangat beragam, antara lain: tersedianya kursus dan pelatihan keterampilan kerja, seperti menjahit, tata boga, otomotif, computer, desain grafis); pendidikan kesetaraan (paket A, B, dan C sebagai pengganti SD, SMP, dan SMA); pendidikan berbasis komunitas (belajar di sanggar belajar, PKBM, pusat pelatihan masyarakat); pendidikan keaksaraan dan keaksaraan fungsional (untuk memberantas adanya buta huruf); pendidikan keagamaan nonformal (TPQ, madrasah diniyah, pengajian rutin); dan bentuk lainnya yang menunjang kapasitas pengetahuan dan keterampilan di luar lingkungan sekolah [46]. Pendidikan ini berfokus pada pemberian keterampilan dan pengetahuan praktis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun fungsi pendidikan nonformal sebagai pelengkap atau pengganti pendidikan formal, khususnya bagi individu yang tidak dapat mengakses pendidikan formal agar tetap memperoleh pendidikan yang setara. Fungsinya mencakup peningkatan kompetensi melalui kursus dan pelatihan kerja, memberikan pemberdayaan dan pengembangan potensi individu, serta menumbuhkan kesadaran sosial dan partisipasi warga negara dalam membentuk lingkungan yang inklusif, berdaya dan harmonis [47]. Dengan pendekatan

inklusif dan harmoni membantu lembaga pendidikan nonformal mampu untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak tersentuh oleh sistem pendidikan formal dan memainkan peran penting untuk membentuk dan menumbuhkan masyarakat sebagai pembelajar sepanjang hayat serta meningkatkan kompetensi masyarakat dan mendukung perkembangan sosial-ekonomi [48].

Lembaga Pendidikan Informal

Pendidikan informal merupakan bentuk pendidikan yang berlangsung secara alami namun berlangsung terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari [49]. Bentuk pendidikan ini terjadi secara alamiah, melalui interaksi dalam keluarga, lingkungan sosial, serta pengalaman hidup seseorang. Contohnya adalah pembelajaran nilai-nilai moral dari orang tua, keterampilan hidup yang diperoleh dari pengalaman kerja, atau pengetahuan yang di dapat melalui bacaan dan media [50]. Karakter dari pendidikan informal ini adalah fleksibilitasnya, baik dari segi waktu, tempat maupun metodenya tidak terikat oleh kurikulum atau batasan terhadap jenjang pendidikan tertentu.

Selain itu, pendidikan informal juga bentuk nyata fungsi pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning) [51]. Dalam era digital saat ini, banyak orang yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru melalui berbagai sumber informal, seperti dalam keluarga dimana orang tua menjadi pendidik utama yang membimbing anak dalam internalisasi nilai-nilai agama dan sosial; komunitas sosial dengan melalui kegiatan adat, keagamaan, atau adanya interaksi di lingkungan sekitar; media dan teknologi seperti internet, media sosial, televisi dan platform pembelajaran online; dan pengalaman kerja yang banyak memberikan keterampilan hidup seperti bekerja, berorganisasi, atau

menghadapi masalah di kehidupan nyata [52]. Dengan demikian, adanya pendidikan formal memiliki peran yang krusial dalam membentuk individu yang utuh baik secara emosional, sosial dan intelektualnya. Meskipun tidak memiliki struktur seperti pendidikan formal maupun nonformal tetapi tetap menjadi fondasi dasar dalam pengembangan potensi secara holistik. Untuk melaksanakan pendidikan tersebut, seorang anak memerlukan dukungan orang dari berbagai kalangan agar ia dapat memenuhi fungsinya sebagai manusia pembelajar sejati seperti, di lingkungan, masyarakat, pemerintah, dan keluarga, terutama orang tua. [5]

C. Peran Lembaga Pendidikan Dalam Struktur Sosial

Lembaga juga memainkan perannya dalam struktur sosial, sebagai berikut:

Penguatan Kapasitas Intelektual dan Kompetensi Individu

Lembaga pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal, memiliki peran sentral dalam meningkatkan kapasitas intelektual dan kompetensi individu [53]. Pendidikan menjadi sarana utama dalam memberikan fondasi akademik yang kuat bagi peserta didik baik potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif [54], [15]. Pada pendidikan formal, mulai pada tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, peserta didik akan dibimbing untuk mengembangkan pola berpikir dan keterampilan praktis [55]. Dengan adanya kurikulum yang terstruktur memungkinkan peserta didik membangun dasar-dasar literasi dan numerasi, memperluas wawasan ilmiah, serta meningkatkan untuk berpikir secara lebih reflektif dan logis. Di jenjang perguruan tinggi, mahasiswa didorong untuk berpikir secara lebih mendalam melalui penelitian, diskusi

akademik, dan pembelajaran yang lebih banyak berbasis proyek yang memicu kreativitas dan inovasi [56].

Di samping itu, lembaga pendidikan juga berperan dalam membentuk *soft skills* untuk meningkatkan keterampilan teknis seperti kemampuan komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan dan manajemen waktu, untuk membekali peserta didik menghadapi dinamika kehidupan modern. Pada akhirnya penguatan kapasitas intelektual ini mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja untuk menghasilkan ide-ide baru, memecahkan masalah dan menemukan solusi baru untuk berbagai masalah. Hal ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas nasional dan pembangunan sosial yang berkelanjutan [34].

Internalisasi Etika dan Moralitas Sosial

Salah satu peran utama lembaga pendidikan adalah menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat [9]. Pendidikan bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter dan keimanan peserta didik secara utuh dan berkesinambungan [23]. Salah satu kontribusi fundamental lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai etika dan moralitas sosial seperti kejujuran, disiplin, rasa hormat, dan empati [19]. Proses ini dikenal sebagai internalisasi, yaitu penanaman nilai yang dilakukan secara berulang dan konsisten hingga menjadi bagian dari kepribadian seseorang.

Lembaga pendidikan juga berperan dalam mengembangkan kesadaran terhadap pentingnya keberagaman dan toleransi [57]. Dalam konteks ini masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, lembaga pendidikan menjadi arena untuk menumbuhkan dan mengajarkan menghargai terhadap perbedaan budaya, agama, dan pandangan hidup [58]. Individu yang memiliki

kesadaran etis cenderung mampu untuk menjalin hubungan sosial yang sehat, menghindari perilaku menyimpang, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Demikian, internalisasi nilai-nilai etika dan moral melalui pendidikan bukan hanya menghasilkan individu yang berkarakter kuat tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih manusiawi, toleran dan bermartabat.

Penghubung Antara Dunia Akademik dan Sektor Industri

Dalam konteks dinamika global yang terus berubah dengan cepat, membawa keterkaitan antara dunia akademik dan sektor industri menjadi hal yang sangat penting. Salah satu tantangan utama dalam sistem pendidikan adalah menjembatani kesenjangan antara *output* pendidikan dan kebutuhan nyata di dunia kerja [32]. Sumber daya manusia yang ada diharapkan mampu menghadapi tantangan di era digitalisasi diantaranya pengembangan melalui pengetahuan, kualitas kompetensi, kreativitas, inovatif dan mandiri yang bersifat *soft skill* (komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan), *hard skill* (penguasaan teknologi, kemampuan analisis data), *social skill* (kemampuan beradaptasi dalam kerja tim) dan *mental skill* (ketahanan terhadap tekanan, kemampuan berpikir kritis, dan inovasi) [11].

Melalui pendidikan yang berkualitas mampu untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk berkontribusi dalam berbagai sektor ekonomi. Namun, kesenjangan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan di banyak negara [21]. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pendidikan telah difokuskan pada peningkatan kerja sama antara dunia akademik dan sektor industri, termasuk melalui program magang, pendidikan berbasis kompetensi, dan pelatihan kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja [59].

Transformasi Sosial Melalui Pendidikan Inklusif

Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan tetapi juga mendorong adanya transformasi sosial dalam berbagai aspek kehidupan [15]. Pendidikan sebagai transformasi budaya sosial dapat dikatakan sebagai kegiatan penyebaran budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti nilai-nilai yang dapat untuk diwariskan, seperti rasa tanggung jawab, nilai-nilai kejujuran dan lain-lainnya [60]. Prinsip dasar dari pendidikan inklusif adalah keadilan dan kesetaraan yang dimana lembaga pendidikan sebagai alat transformasi sosial dengan menyediakan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang beruntung. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam akses pendidikan bagi individu dengan disabilitas, kelompok minoritas, dan masyarakat miskin [61]. Selain itu, pendidikan juga menjadi alat utama dalam menghadapi tantangan global, seperti ketimpangan ekonomi, dan konflik sosial [34].

D. Tantangan Paradigmatik dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi, namun perkembangannya dihadapkan pada berbagai tantangan paradigmatik yang mempengaruhi efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Beberapa tantangan utama yang muncul dalam sistem pendidikan menjadi permasalahan struktural yang membutuhkan solusi komprehensif agar pendidikan dapat tetap relevan dan inklusif dalam menghadapi perubahan zaman.

E. Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan

Salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan adalah kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan di berbagai kelompok sosial dan geografis [62]. Pendidikan

menjadi penting untuk mendorong mobilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan individu di masyarakat [34]. Peningkatan pendidikan tidak hanya memberikan dampak pada kemampuan seseorang dalam bersaing di dunia industri, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan inovasi di dalam keluarga dan masyarakat. Namun, adanya pendidikan memberi kesempatan kepada orang-orang dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu untuk mengubah hidup dan nasib mereka untuk manapaki tangga sosial yang lebih baik [18].

Adanya akses, kualitas, motivasi, dan dukungan akademik yang diterima orang dari berbagai latar belakang ekonomi sangat dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi ini [63]. Fenomena adanya kesenjangan dalam ekonomi masih menjadi fokus utama dalam pendidikan karena hal tersebut akan berdampak pada ketidaksetaraan dalam akses pendidikan yang berkualitas. Meskipun telah dilakukan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, namun masih banyak individu dari keluarga berpenghasilan rendah masih menghadapi kesulitan mendapatkan pendidikan berkualitas, sehingga sulit bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka [64].

F. Dinamika Globalisasi dan Digitalisasi Dalam Kurikulum

Digitalisasi dan globalisasi telah mengubah banyak dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan [65]. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka akses terhadap sumber belajar yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam adaptasi kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan sebagai agen perubahan sosial bergantung pada kemampuan sistemnya beradaptasi dengan

perubahan sosial baik dalam teknologi dan tuntutan zaman [15]. Kemajuan dalam perkembangan teknologi baru mampu menggantikan beberapa tugas manusia, sehingga sumber daya manusianya perlu belajar keterampilan yang baru agar tetap relevan dengan dunia industri yang ketat [11]. Adanya perkembangan dalam globalisasi dan teknologi mendapati dinamika yang komprehensif karena adanya perkembangan itu menyebabkan adanya perubahan dalam pasar kerja yang telah berubah, sehingga menuntut orang untuk memiliki keterampilan yang relevan dan pengetahuan yang diperbaharui secara konsisten. Salah satu tantangan utama dalam konteks ini adalah bagaimana kurikulum pendidikan dapat mengakomodasi **keterampilan abad ke-21**, yang mencakup keterampilan digital, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kolaborasi. Namun, banyak sistem pendidikan masih berbasis pada pendekatan konvensional yang menekankan hafalan dan evaluasi berbasis ujian, sehingga kurang memberikan ruang bagi pengembangan keterampilan yang lebih adaptif [53].

G. Ketidaksesuaian Antara Kompetensi Akademik dan Kebutuhan Industri

Salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah adanya ketimpangan antara kompetensi akademik yang diajarkan di lembaga pendidikan dengan kebutuhan nyata di dunia industri. Adanya percepatan perkembangan teknologi tersebut, khususnya di era digital dan revolusi industri 4.0, telah mengubah secara drastis lanskap pekerjaan dan keterampilan. Perubahan yang cepat dalam industri, terutama dengan adanya revolusi industri 4.0, menyebabkan banyak keterampilan yang sebelumnya dianggap penting menjadi usang [32].

Masih banyak lembaga pendidikan masih berfokus pada model pembelajaran konvensional, tetapi bisnis saat ini lebih membutuhkan tenaga kerja yang mahir dalam teknologi digital, kecerdasan buatan, dan analisis data [66]. Lembaga pendidikan perlu menjalin kemitraan erat dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk mengembangkan model pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan kontekstual [67]. Dengan demikian akan munculnya keselarasan antara kompetensi akademik dan kebutuhan industri bukan hanya menjadi sebuah tuntutan semata tetapi sudah menjadi sebuah keharusan strategis untuk menciptakan lulusan yang siap berdaya saing global.

Pendidikan memainkan fungsi mendasar dalam desain individu dan masyarakat. Fungsi utama pendidikan adalah pengembangan intelektual, peningkatan keterampilan, dan internalisasi nilai-nilai sosial dan budaya. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial yang memungkinkan individu untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial mereka, sementara secara bersamaan mempertahankan keberlanjutan norma dan tradisi dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya didasarkan pada aspek akademik, tetapi juga membentuk kepribadian dan etika siswa untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial. Lembaga pendidikan secara resmi dibagi menjadi kategori formal, nonformal, dan informal. Lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan universitas memiliki struktur kurikulum yang sistematis dan terorganisir yang memberikan akreditasi formal kepada siswa. Lembaga pendidikan nonformal seperti kursus dan kursus pelatihan ingin memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel dan meningkatkan kemampuan orang di

luar jalur pendidikan formal. Sementara itu, pendidikan informal dalam pengaturan keluarga dan komunitas secara alami terjadi melalui interaksi sosial sehari-hari. Ini berperan dalam komunikasi nilai-nilai moral, budaya dan keterampilan hidup yang tidak selalu diajarkan di lembaga formal.

Semua jenis lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam desain kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan individu untuk menghadapi tantangan kehidupan sosial. Dengan hanya keberadaan dan akses pembentukan kualitas, diharapkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih progresif dan kompetitif dan memiliki persepsi sosial yang kuat. Oleh karena itu, untuk memberikan kontribusi yang paling optimal untuk pembangunan manusia dan kemajuan sosial yang berkelanjutan, sinergi antara pendidikan formal, informal dan informal harus diperkuat.

H. Daftar Pustaka

- [1] D. Pristiwanti, B. Badariah, S. Hidayat, and R. S. Dewi, "Pengertian pendidikan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, vol. 4, no. 6, pp. 7911–7915, 2022.
- [2] S. Arifin, "Peran guru pendidikan jasmani dalam pembentukan pendidikan karakter peserta didik," *Multilateral: Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga*, vol. 16, no. 1, 2017.
- [3] W. Buska and Y. Prihartini, "Pendidikan Sebagai Proses Transmisi Sosial Budaya," *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, vol. 25, no. 1, pp. 37–52, 2019.
- [4] M. Ansori and K. Sassi, "Analisis Sistem Pendidikan Di Jepang," *Jurnal Inovasi Pendidikan*, vol. 7, no. 10, 2024.
- [5] Y. Alquriyah and A. Ahmadi, "Pentingnya Program Kecakapan Hidup (Life Skills) Untuk Para Santri di

- Pondok Pesantren,” *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, vol. 19, no. 1, pp. 82–94, 2021.
- [6] A. Pare and H. Sihotang, “Pendidikan holistik untuk mengembangkan keterampilan abad 21 dalam menghadapi tantangan era digital,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 3, p. 27778, 2023.
- [7] M. Sari, “Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam dalam Pembentukan Karakter dan Etika Siswa di Tingkat Sekolah Dasar,” *Al-Mujahadah: Islamic Education Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 54–71, 2023.
- [8] L. S. I. Lumuan, A. Wantu, and U. Hamim, “Peran guru PPKn dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik di SMP Negeri 1 Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, vol. 6, no. 2, pp. 210–221, 2023.
- [9] S. Nurhaliza, “Pendidikan Agama Islam dan Peningkatan Keterampilan Sosial dalam Memainkan Peran Penting Membentuk Karakter Moral dan Sosial Siswa,” *Integrated Education Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 1–21, 2024.
- [10] S. Maulidin and S. W. Janah, “Pengaruh kemampuan membaca al-Qur’an terhadap psikomotorik peserta didik pada mata pelajaran al-Qur’an hadis (studi di MTs Miftahul ‘Ulum Kotabaru),” *Crossroad Research Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 22–35, 2025.
- [11] A. N. Ayyasy and S. Maelani, “Tantangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi Era Digital: Sebuah Literatur Review,” *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, vol. 1, no. 02, pp. 53–59, 2024.
- [12] O. M. P. R. Pratiwi, “Pemanfaatan Tradisi Lisan Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Dalam

- Pembelajaran,” *Pedalitra: Prosiding Pedagogi, Linguistik, Dan Sastra*, vol. 4, no. 1, pp. 158–166, 2024.
- [13] A. R. Rasyid, A. Raffli, A. Aditya, S. Rahmadani, Y. Hania, and Z. F. Qiran, “Pentingnya pendidikan multikultural dalam konteks Pancasila di masyarakat,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, vol. 7, no. 2, pp. 3648–3655, 2024.
- [14] S. Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta teoretis-filosofis dan aplikatif-normatif*. Amzah, 2022.
- [15] J. N. Baiti, N. H. Rosyidah, T. N. A. Isma, and S. Nafisah, “Pendidikan dan lingkungan sosial, pendidikan dan kebudayaan, pendidikan sebagai agen perubahan,” *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, vol. 2, no. 6, pp. 132–145, 2024.
- [16] D. G. S. Sasongko, “Pengertian Pendidikan,” *Universitas Indraprasta PGRI Jakarta*, vol. 2, 2018.
- [17] R. R. Eliandy, R. Adila, E. A. Hasibuan, and R. Ababiel, “Karakteristik, Jenis Dan Satuan Pendidikan Luar Sekolah,” *ITTIHAD*, vol. 5, no. 1, 2023.
- [18] A. Edo and M. Yasin, “Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial,” *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (SINOVA)*, vol. 2, no. 3, pp. 317–326, 2024.
- [19] A. A. Zafi, “Transformasi budaya melalui lembaga pendidikan (pembudayaan dalam pembentukan karakter),” *Al Ghazali*, vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2018.
- [20] L. D. Sanga and Y. Wangdra, “Pendidikan adalah faktor penentu daya saing bangsa,” in *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 2023, pp. 84–90.

- [21] Y. M. Cholily, W. T. Putri, and P. A. Kusgiarohmah, "Pembelajaran di era revolusi industri 4.0," in *Seminar & Conference Proceedings of UMT*, 2019.
- [22] A. A. Maisaroh and S. Untari, "Transformasi pendidikan karakter melalui kebijakan pemerintah di Indonesia menuju generasi emas 2045," *Jurnal kebijakan pemerintahan*, pp. 18–30, 2024.
- [23] N. Humaidi, A. Tinus, and A. Asrori, "Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan di Indonesia," *TADARUS*, vol. 10, no. 2, 2021.
- [24] P. K. Ndoa and S. Hulu, "Pendidikan Sebagai Upaya Pemerdekaan Manusia," *Jurnal Magistra*, vol. 1, no. 1, pp. 53–65, 2023.
- [25] M. Syahri, A. P. Wibowo, A. D. M. Pratiwi, and A. Tinus, "Ecological education: Concrete efforts in applying the concept of ecological citizenship in Malang," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, vol. 19, no. 2, pp. 278–287, Oct. 2022, doi: 10.21831/jc.v19i2.52857.
- [26] S. Suyato, "Belajar demokrasi di sekolah: Re-orientasi pendidikan dan pengembangan kultur sekolah yang humanis," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, vol. 13, no. 1, pp. 82–95, 2016.
- [27] H. Umar and E. Masnawati, "Peran lingkungan sekolah dalam pembentukan identitas remaja," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, pp. 191–204, 2024.
- [28] D. Sefrina, "Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran PAI," *Komprehensif*, vol. 3, no. 1, pp. 21–31, 2025.
- [29] S. E. Sadita and S. Syafitri, "Analisis dan implementasi pendidikan dasar sebagai proses pewarisan budaya," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 9, no. 2, pp. 7190–7197, 2024.

- [30] A. Istianah, C. Darmawan, D. Sundawa, and S. Fitriasari, "Peran pendidikan kebinekaan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang damai," *Jurnal moral kemasyarakatan*, vol. 9, no. 1, pp. 15–29, 2024.
- [31] Z. N. Afif, "Manajemen kurikulum program pembelajaran kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan," *At Tadbir: Islamic Education Management Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 66–77, 2024.
- [32] I. G. N. Santika, "Grand desain kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0," *Jurnal Education and development*, vol. 9, no. 2, pp. 369–377, 2021.
- [33] S. Sultani, A. Alfitri, and N. Noorhaidi, "Teori Belajar Humanistik Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 177–193, 2023.
- [34] H. Hendrizal, M. Joni, K. Hijrat, J. I. Wandu, and N. Afrita, "Pendidikan sebagai Investasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *El-Kahfi/ Journal of Islamic Economics*, vol. 5, no. 01, pp. 81–90, 2024.
- [35] A. Afdhal, F. Manuputty, S. C. H. Litaay, and N. D. Makaruku, "Nilai-nilai Kearifan Lokal Maluku dalam Hidden curriculum: Strategi Membangun Perdamaian dan Toleransi di Sekolah Dasar," *Journal of Education Research*, vol. 5, no. 4, pp. 5071–5083, 2024.
- [36] Y. V. Kisda, A. Ravika, and A. Septarina, "Analisis Peran Sekolah dalam Mengatasi Masalah Perilaku Menyimpang Siswa di SDN 08 Indralaya Utara," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama*, vol. 2, no. 3, pp. 78–86, 2024.

- [37] H. KURNIAWAN, "Strategi guru pendidikan agama Islam dalam penanaman pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Patebon," *UIN Walisongo, Semarang*.
- [38] M. Al Mighwar and S. Rahmawati, "Analysis of Children's Character Education and Anti-Violence Policies in Indonesia," *DIROSAT: Journal of Education, Social Sciences & Humanities*, vol. 1, no. 4, pp. 175–185, 2023.
- [39] A. Warisno, "Pengembangan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu lulusan pada lembaga pendidikan islam di kabupaten," *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, vol. 3, no. 02, pp. 99–113, 2018.
- [40] R. Syaadah, M. H. A. A. Ary, N. Silitonga, and S. F. Rangkyut, "Pendidikan formal, Pendidikan non formal Dan Pendidikan informal," *PEMA*, vol. 2, no. 2, pp. 125–131, 2022.
- [41] R. A. Putra, "Penerapan metode pembelajaran mandiri dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik (studi pada program pendidikan kesetaraan paket c di PKBM bina mandiri cipageran)," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, vol. 13, no. 1, 2017.
- [42] I. A. Hadi, "Pentingnya pendidikan karakter dalam lembaga formal," *Jurnal Inspirasi*, vol. 3, no. 1, 2019.
- [43] I. Akmal, "Pengembangan kurikulum pendidikan dalam membentuk peradaban manusia," *Anatesa: Kajian Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, vol. 14, no. 2, pp. 86–107, 2024.
- [44] N. Laili and M. Y. Ashari, "Kajian Historis Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia: Tinjauan Komprehensif Terhadap Dimensi Formal, Informal, Dan Nonformal," *JOURNAL J-MPI: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN KAJIAN KEISLAMAN*, vol. 3, no. 1, pp. 5–14, 2024.

- [45] T. Mildawati and T. Tangngareng, "Jenis-Jenis Pendidikan (Formal, Nonformal Dan Informal) Dalam Perspektif Islam," *Vifada Journal of Education*, vol. 1, no. 2, pp. 1–28, 2023.
- [46] J. M. T. Kristiani, L. S. Sari, L. H. Winingsih, A. A. Sulistiono, and Y. Yufridawati, "Efektivitas penyelenggaraan kursus dalam penyiapan sumber daya manusia di dunia kerja," 2018, *Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan*.
- [47] S. S. Febriani, I. Nawari, K. P. Kurniawan, S. Fitriyyah, and W. Nilamsari, "Evaluasi Berbasis Tujuan Pada Pelaksanaan Program Kesetaraan PKBM al-Insan Pada Paket A Melalui Efektivitas Dan Minat Warga Belajar," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, vol. 1, no. 3, pp. 966–973, 2023.
- [48] R. Rusmulyani, "Technical Vocational Education and Training (TVET) Innovation Dengan Model Pelatihan Berbasis Kompetensi Dalam Pengembangan Soft-Skill Sumber Daya Manusia," *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 1, no. 8, pp. 1495–1506, 2021.
- [49] D. B. Irsalulloh and B. Maunah, "Peran lembaga pendidikan dalam sistem pendidikan Indonesia," *Pendidikdas: Jurnal Pendidikan Dasar*, vol. 4, no. 2, pp. 17–26, 2023.
- [50] B. Subiyakto and M. Mutiani, "Internalisasi nilai pendidikan melalui aktivitas masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, vol. 17, no. 1, pp. 137–166, 2019.
- [51] M. A. AF, K. Nurfadilah, and C. Hilman, "Pendidikan Luar Sekolah dalam Kerangka Pendidikan Sepanjang Hayat,"

- Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, vol. 2, no. 2, pp. 90–95, 2022.
- [52] A. Fricticarani, A. Hayati, I. Hoirunisa, and G. M. Rosdalina, “Strategi pendidikan untuk sukses di era teknologi 5.0,” *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Teknologi Informasi (JIPTI)*, vol. 4, no. 1, pp. 56–68, 2023.
- [53] E. Y. Wijaya, D. A. Sudjimat, and A. Nyoto, “Transformasi pendidikan abad 21 sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era global,” in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika*, 2016, pp. 263–278.
- [54] N. Hasibuan, U. Khasanah, and S. N. Alanur, “Transformasi Pendidikan Karakter: Menuju Sdm Unggul Dan Berkelanjutan,” *Penerbit Tahta Media*, 2024.
- [55] B. Sasomo, “Analisis Problematika Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Matematika Pada Tingkat SMP,” *Indonesian Journal Of Education and Learning Mathematics*, vol. 4, no. 01, pp. 16–21, 2023.
- [56] S. Zubaidah, “Memberdayakan keterampilan abad ke-21 melalui pembelajaran berbasis proyek,” in *Seminar Nasional Nasional Pendidikan Biologi*, 2019, pp. 1–19.
- [57] A. G. Saputra, S. C. Juliansyah, and S. Athayla, “Pendidikan pancasila dalam era multikulturalisme: membangun toleransi dan menghargai keberagaman,” *Advances In Social Humanities Research*, vol. 1, no. 5, pp. 573–580, 2023.
- [58] S. Nurhidayah, A. Rahmawati, and D. S. Saputra, “Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal,” *Journal of Innovation in Primary Education*, vol. 1, no. 1, pp. 33–39, 2022.

- [59] M. Yahya and A. Hidayat, "Implementasi Artificial Intelligence (AI) di bidang pendidikan kejuruan pada era revolusi industri 4.0," in *Seminar Nasional Dies Natalis 62*, 2023, pp. 190–199.
- [60] A. Tinus and R. T. Wulandari, "The reinforcement of the school culture-based character education," *Italian Journal of Sociology of Education*, vol. 13, no. Italian Journal of Sociology of Education 13/2, pp. 195–218, 2021.
- [61] S. S. Efriyanti and M. Albina, "Strategi Pembelajaran Berdasarkan Analisis Kebutuhan Belajar Dalam Pendidikan Inklusif," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, vol. 3, no. 1, pp. 367–376, 2025.
- [62] A. D. Yanti, M. Syaifudin, A. T. Mulio, D. Hendra, and E. Marlina, "Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Journal of Islamic Education El Madani*, vol. 4, no. 1, pp. 47–52, 2024.
- [63] N. L. P. Ratnasari, "DAMPAK SOSIAL EKONOMI TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI," *PROSPEK*, vol. 4, no. 1, pp. 87–95, 2025.
- [64] C. M. Fajar and D. Mulyanti, "Meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan melalui perencanaan investasi pendidikan," *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, pp. 89–95, 2019.
- [65] J. A. Sari and B. A. Diana, "Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, vol. 9, no. 2, pp. 88–96, 2024.
- [66] Z. A. Kasjib and F. Indayani, "Pendidikan STEM dan Ekonomi Digital: Membangun Tenaga Kerja yang

Terampil untuk Masa Depan,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 8, no. 2, pp. 1391–1398, 2025.

- [67] M. Midiaty, W. G. Mulawarman, and M. A. Masruhim, “Analisis implementasi manajemen Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan SMK Pusat Keunggulan,” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, vol. 4, no. 2, pp. 123–134, 2024.